



**IMPLEMENTASI TAX PLANNING TERHADAP PERHITUNGAN
PPh BADAN PADA PT CITRA ABADI SEJATI**

Skripsi

Dibuat Oleh :
Ihda Okta Evi Ana
0221 11 116

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
Mei 2016**

IMPLEMENTASI TAX PLANNING TERHADAP PERHITUNGAN PPh
BADAN PADA PT CITRA ABADI SEJATI

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak.,MM.,CA.)

Ketua Jurusan,

(Dr. Areif Tri Hardiyanto, Ak.,MBA.,CMA.,CCSA.,CA.)

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING TERHADAP PERHITUNGAN PPh
BADAN PADA PT CITRA ABADI SEJATI**

SKRIPSI

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2016

Ihda Okta Evi Ana
0221 11 116

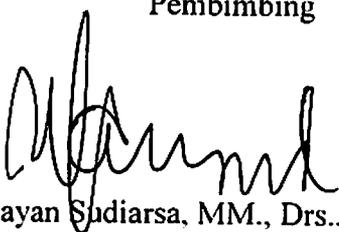
Menyetujui,

Dosen Penilai,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a smaller, more intricate signature on the right, all enclosed within a large, thin oval outline.

(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'W' followed by a series of connected, flowing letters.

(Wayan Sudiarsa, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized initial 'W' followed by several connected, flowing letters.

(Wiwik Budianti, M.Si., SE.)

ABSTRAK

IHDA OKTA EVI ANA, NPM 022111116. Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh badan Pada PT Citra Abadi Sejati. Dibawah bimbingan : WAYAN SUDIARSA, Drs., MM dan WIWIEK BUDIARTI M.Si., SE.

Tax planning merupakan langkah awal dalam upaya menimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Tax planning dibagi menjadi beberapa bagian, dari bagian yang ada penulis mengambil pembahasan tax planning hanya dari aset tetap perusahaan.

Aset tetap merupakan elemen utama dari harta perusahaan yang cukup material, karena sangat material sebaiknya setiap perusahaan melakukan perencanaan pajak aset tetapnya agar pajak yang dibayarkan tidak perlu lebih dari jumlah yang seharusnya. PT. Citra Abadi Sejati belum menerapkan perencanaan pajak atas penyusutan aset tetapnya yang mengakibatkan beban pajak penghasilan perusahaan belum efisien. Dimana biaya penyusutan aset tetap yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan perusahaan. Maka adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui (1) gambaran kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Citra Abadi Sejati, (2) penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. Citra Abadi Sejati dengan metode alternatif sesuai dengan ketentuan perpajakan, (3) apa pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Citra Abadi Sejati.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Eksplanatori dengan metode penelitian studi kasus, dan teknik penelitian analisis kuantitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada PT. Citra Abadi Sejati, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari bagian Akuntansi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi tax planning terhadap aset tetap perusahaan berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan, yang menjadi indikatornya adalah kebijakan penyusutan aset tetap, dimana dari sini dapat diketahui metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetapnya adalah garis lurus, dan masih ada metode penyusutan alternative yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yaitu metode saldo menurun, dimana metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang besar pada awal dan akan semakin menurun di setiap tahunnya dan seperti diketahui bahwa beban penyusutan merupakan salah satu pengurang dari profit atau penghasilan bruto, sehingga PPh yang di bayarkan berkurang dan menjadikannya lebih efisien, jika jumlah itu dilihat dari *present value* maka untuk tahun 2010 perusahaan bisa menghemat 34% PPh badannya, tahun 2011 sekitar 10%, ditahun 2012 penghematannya menurun menjadi sebanyak 52%, dan pada tahun 2013 sebesar 31%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi tax planning terhadap aset tetap berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan dan saran yang dapat penulis berikan adalah agar perusahaan melakukan perencanaan pajak terhadap aset tetapnya dengan memilih metode penyusutan garis lurus sehingga dapat memperkecil beban pajak penghasilannya.

Kata Kunci: Implementasi Tax Planning, Perhitungan PPh Badan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia hidayah dan Ridho-Nya kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul : “Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan”.

Skripsi ini di buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Sehubungan denan itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga serta bantuan moral dan materiil dalam penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Dr. Arif Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Wayan Sudiarsa, Drs., MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan bimbingan serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Wiwik Budianti, M.Si., SE. selaku C.o pembimbing skripsi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Ellyn Octaviany, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.
7. Pihak PT. Citra Abadi Sejati Bogor, yang telah mengizinkan penulis untuk riset serta memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan : Silvyva, Puspita, Diah Risti, Tiara, Ega, Sri, tyas, Inung dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Semoga skripsi bermanfaat bagi pembaca dan yang memerlukanya.

Bogor, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Perumusan Masalah	5
1.2.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pajak	7
2.1.1. Fungsi Pajak	7
2.1.2. Sistem Perpajakan	11
2.1.3. Jenis – Jenis Pajak	12
2.1.4. Pengendalian Pajak (Tax Control).....	12
2.1.5. Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak	17
2.1.6. Langkah – Langkah Dalam Perencanaan Pajak	21
2.1.7. Pemilihan Metode Akuntansi	24
2.1.8. Strategi dalam Perencanaan Pajak	24
2.1.9. Pengertian Penghematan Pajak.....	25
2.1.10. Koreksi Fiskal.....	25
2.1.11. Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan	26
2.2. Pajak Penghasilan Badan	28
2.2.1. Subjek Pajak	28
2.2.2. Objek Pajak	29
2.2.3. Pajak Penghasilan Final	30
2.2.4. Pengecualian Sebagai Objek Pajak	33
2.2.5. Pengurangan Objek Pajak	34
2.2.6. Pengecualian Sebagai Pengurangan Objek Pajak	36
2.2.7. Penghasilan Kena Pajak	36
2.2.8. Tarif Pajak Badan	36
2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Penelitian	37
2.3.1. Penelitian Sebelumnya	37
2.3.2. Paradigma Penelitian	41

BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Jenis Penelitian	42
	3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	42
	3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
	3.4. Operasionalisasi Variabel	44
	3.5. Metode Penarikan Sampel	45
	3.6. Metode Pengumpulan Data	45
	3.7. Metode Pengolahan/ Analisis Data	46
BAB IV	PEMBAHASAN	
	4.1. Gambaran Umum Perusahaan	47
	4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	47
	4.1.2. Kegiatan Usaha.....	47
	4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	53
	4.2. Kebijakan Akuntansi	57
	4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pengukuran dan Pengakuan Aset Tetap.....	57
	4.2.2. Klasifikasi Aset Tetap	57
	4.2.3. Cara perolehan Aset Tetap	59
	4.3. Pembahasan.....	61
	4.3.1. Kebijakan Pajak Untuk Penyusutan	61
	4.3.2. Penyusutan.....	62
	4.3.3. Nilai Perolehan.....	68
	4.3.4. Beban Penyusutan	71
	4.3.5. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan	75
	4.3.5.1. Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Ketentuan Pajak dengan Metode Garis Lurus	75
	4.3.5.2. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Pajak dengan Metode Saldo Menurun	78
	4.3.5.3. Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap atas Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan menggunakan <i>Present Value</i>	82
	4.3.5.4. Perbandingan Penghematan Beban Pajak antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan menggunakan <i>Present Value</i>	86
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Simpulan.....	89
	5.2. Saran	90

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Metode Penyusutan
- Tabel 2 : Konsep perhitungan Laba/Rugi Komersial
- Tabel 3 : Konsep perhitungan Laba/Rugi Fiska
- Tabel 4 : Operasionalisasi Variabel (Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh badan)
- Tabel 5 : Daftar Aset Tetap Pada PT Citra Abadi Sejati
- Tabel 6 : Saldo Awal, Penambah, Pengurang dan Saldo Akhir Aset Tetap Pada PT. Citra Abadi Sejati
- Tabel 7 : Saldo Awal, Penambah, Pengurang dan Saldo Akhir Aset Tetap Pada PT. Citra Abadi Sejati
- Tabel 8 : Saldo Awal, Penambah, Pengurang dan Saldo Akhir Aset Tetap Pada PT. Citra Abadi Sejati
- Tabel 9 : Saldo Awal, Penambah, Pengurang dan Saldo Akhir Aset Tetap Pada PT. Citra Abadi Sejati
- Tabel 10 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 6.5% Tahun 2010
- Tabel 11 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 6% Tahun 2011
- Tabel 12 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 5.75% Tahun 2012
- Tabel 13 : Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 7.5% Tahun 2013
- Tabel 14 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2010
- Tabel 15 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan q Metode Garis Lurus Tahun 2011
- Tabel 16 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2012
- Tabel 17 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2013
- Tabel 18 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2010

- Tabel 19 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2011
- Tabel 20 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2012
- Tabel 21 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2013
- Tabel 22 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dengan Present Value 6,5% Tahun 2010
- Tabel 23 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun dengan Present Value 6,5% Tahun 2010
- Tabel 24 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dengan Present Value 6% Tahun 2011
- Tabel 25 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun dengan Present Value 6% Tahun 2011
- Tabel 26 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dengan Present Value 5,75% Tahun 2012
- Tabel 27 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun dengan Present Value 5,75% Tahun 2012
- Tabel 28 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus dengan Present Value 7,5% Tahun 2013
- Tabel 29 : Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan Metode Saldo Menurun dengan Present Value 7,5% Tahun 2013
- Tabel 30 : Perbandingan Penghematan Beban Pajak antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Tahun 2010-2013
- Tabel 31 : Perbandingan Beban Pajak dengan Potensi Penghematan Pajak Tahun 2010-2013

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Keuangan 2010-2012 Pada PT Citra Abadi Sejati

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya.

Secara konseptual justru dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang - undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang - undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang - undang (*lawful*). Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati - hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Menurut Suandy (2008) ada tiga syarat yang harus diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka wajib

pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan perencanaan itu sendiri.

2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula.
3. Terdapat bukti - bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal.

Tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Undang - Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1.

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung Pajak. Yang menjadi Objek PPh adalah Penghasilan.

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28%. Tarif PPh tersebut menjadi 25% mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan Tax planning dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erni Ramayanti BR Jawak, 2010 yang berjudul Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan. Hasil penelitian yang didapatkan PT Agricon Putra Citra Optima (APCO) merupakan perusahaan yang berbentuk badan perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa pengendalian rayap dan hama, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisienkan pembayaran pajak terutang. Dengan melaksanakan tax planning, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan

kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Irnia Dina Rosa, 2014 yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Badan sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang pada PT X. Hasil dari penelitian Perencanaan pajak atas aktiva tetap pada PT X Surabaya sebenarnya dapat dilakukan dengan cara memilih metode penyusutan aktiva tetap secara tepat, yaitu dengan menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun. Penggunaan Metode Penyusutan Saldo Menurun, setelah dilakukan perhitungan ditemukan bahwa pajak yang dibayarkan lebih kecil, atau dengan kata lain dapat menghemat pembayaran pajak.

PT Citra Abadi Sejati adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri garment yang beralamat di Jalan Raya Kedung Halang No. 263 Km 52 Bogor 16710. PT Citra Abadi Sejati merupakan perusahaan yang sebelumnya bernama PT Busana perkasa Garment kemudian ada perubahan kepemilikan sehingga sekarang Berganti nama PT Citra Abadi Sejati dan telah berjalan selama 6 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan tidak menyuluruh hanya dalam aset tetap pada PT Citra Abadi Sejati".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Permasalahan yang terdapat di PT Citra Abadi Sejati adalah belum diterapkannya perencanaan pajak atas penyusutan aset tetap yang dapat memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi perusahaan tersebut.

1.2.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah PT Citra Abadi Sejati telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Bagaimana kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Citra Abadi Sejati
3. Apa pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. Citra Abadi Sejati

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu, pengetahuan serta wawasan mengenai perencanaan pajak aset tetap yang dapat dipergunakan kelak sebagai bekal jika penulis telah bekerja, serta menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dan dipelajari

selama berada di bangku kuliah dengan keadaan yang ada pada PT Citra Abadi Sejati.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
2. Untuk menjelaskan gambaran kebijakan penyusutan aset tetap pada PT Citra Abadi Sejati
3. Untuk menjelaskan apa pengaruh penerapan perencanaan pajak aset tetap terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT Citra Abadi Sejati

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Perusahaan dapat menentukan pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai aplikasi untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sebagai masukan, baik untuk bahan referensi dan bahan perbandingan antara teori dan praktek yang ada, dan berguna untuk memberikan gambaran atau wawasan yang jelas tentang implementasi tax planning terhadap perhitungan pph badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Manajemen Pajak

Suandy Perencanaan Pajak (2013,6) Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi – fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
- c. Pengendalian pajak (*tax control*).

(Suandy, 2013, 6)

2.1.1 Perencanaan Pajak (*Tax planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Mengemukakan untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan peraturan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Tax saving* upaya Wajib Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk - produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- b. *Tax avoidance* yaitu upaya Wajib Pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

(suandy, 2013, 7)

Tujuan Tax Planning

- a. Menghilangkan / menghapus pajak sama sekali;
- b. Menghilangkan / menghapus pajak dalam tahun berjalan;
- c. Menunda pengakuan penghasilan;
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain* (keuntungan modal) yang berupa keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek seperti

saham atau dalam bidang property, dimana nilainya melebihi harga pembelian.

Manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur alur kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b. Penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

Prinsip – prinsip untuk menghemat pajak

- a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Menyebarkan penghasilan kebeberapa tahun untuk menghindari pajak yang tinggi.
- c. Mengambil beberapa keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat. Usaha untuk menghemat pajak pada dasarnya berusaha menekan jumlah pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diukur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak dan potensi penghasilannya, dilihat dari segi perpajakan pembagian pajak atas perusahaan memberikan manfaat penghematan pajak.

(Suandy, 2013, 6 – 10)

Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut pendapat Suandy (2013, 10), motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang menjadi tujuan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain :
 1. Jenis Pajak yang akan dipungut.
 2. Subjek Pajak.
 3. Objek Pajak.
 4. Besarnya Tarif Pajak.
 5. Prosedur pembayaran pajak.
- b. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*). Tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Sering terjadi pertentangan antara ketentuan pelaksanaan tersebut dengan undang-undang itu sendiri karena adanya penyesuaian dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat kesempatan tersebut untuk melakukan perencanaan pajak yang baik.
- c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan perusahaan selaku Wajib Pajak karena luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

(Suandy,2013, 10)

2.1.2 Aspek Formal dan Aspek Material

Adapun dalam aspek formal dan materil di dalam perencanaan pajak adalah:

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak
Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpastian terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif maupun aspek material substantif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana. Pungutan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pada Undang-undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal pajak. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat edaran. Saat ini jumlah aturan-aturan pelaksanaan tersebut sudah sangat banyak.
2. Aspek Material dalam Perencanaan Pajak
Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus

dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

(Suandy, 2013, 8-9)

2.1.3 Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila dalam *tax planning* telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun materiil. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasi dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

(Suandy, 2013, 9)

2.1.4 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

(Suandy, 2013, 10)

2.1.5 Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak

Menurut Suandy dalam bukunya bentuk-bentuk perencanaan pajak yaitu:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak / fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (Misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000.
- c. Mengambil keuntungan sebesar - besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak

yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.

- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shif to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
- g. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*).

- h. Perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- i. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
- j. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (*saldo menurun*) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal - awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (*garis lurus*) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.

- k. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- l. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- m. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dan, paling lambat pada akhir bulan penyerahan barang (*Per. Dirjen pajak per-24/PJ/2012*).
- n. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - 1. SPT lebih bayar
 - 2. SPT rugi
 - 3. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - 4. Terdapat informasi pelanggaran
 - 5. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - 6. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (*angsuran masa*) PPh pasal 25 ke KKP yang

bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

- b) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- o. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

(Suandy,2013, 14)

2.1.6 Langkah – Langkah Dalam Perencanaan Pajak

Memaksimalkan Penghasilan yang dikecualikan dalam perencanaan pajak salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, juga harus diketahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang – undang agar dapat diketahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan.

Langkah – langkah yang dapat dilakukan :

- a. Mengubah Jenis Penghasilan Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Contoh : apabila menanamkan saham pada suatu

perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. Contoh : Laba tahun 2010 besar, dan perkiraan laba tahun 2011 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2010 ditunda sampai bulan Januari 2011.

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (*laba*) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*). Contoh : biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

Meminimalkan Tarif pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, membantu menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut.

Perubahan tersebut adalah :

- a. Tarif PPh No. 36 tahun 2008

WP Orang Pribadi : 0 – 50 juta 5%

50 – 250 juta 10 %

250 – 500 juta 25 %

500 juta 30%

Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu diberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf e dan Pasal 17 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di antaranya yaitu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap.

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak.

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut adalah 1%. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak

- b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: *PPh Terutang = (50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.* Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

(Rp 4.800.000.000 / Peredaran bruto) X Penghasilan Kena Pajak Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu :
Penghasilan Kena Pajak – Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

2.1.7 Pemilihan Metode Akuntansi

Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, makasebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa

memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

- a. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh No.36 Tahun 2008, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Dalam UU No.36 Tahun 2008 pasa 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun Berganda
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %

Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak permanen	10 Tahun	10 %	

(Sumber : UU 36 Tahun 2008)

b. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Asset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16, Revisi 2007 tentang Asset Tetap.

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi.

2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Penyusutan adalah setiap bagian dari asset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh asset harus disusutkan secara terpisah. Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut siap untuk digunakakan, yaitu pada saat tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu asset dihentikan lebih awal ketika:

a) Aset tersebut diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual atau asset tersebut termasuk dalam kelompok asset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual.

b) Aset tersebut dihentikan pengakuannya yaitu :
Dilepaskan, Tidak ada masa manfaat ekonomi masa

depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

(PSAK:16 Revisi 2007)

2.1.8 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan (2000: 483) yaitu:

- a. Penggeseran pajak (*shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax Evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- e. *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

2.1.9 Pengertian Penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat

mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Pengertian Penghematan Pajak menurut Zain (2009, 51) dalam bukunya Manajemen Perpajakan adalah sebagai berikut :

Suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

(Zain,2009, 51)

2.1.10 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.

- a. Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.
- b. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara wajib pajak dengan pembuat kewajiban pajak yaitu pemerintah.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Beda Tetap

Terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial tetapi berdasarkan ketentuan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

b. Beda Waktu

Terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

(Suandy,2013, 79)

2.1.11 Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan

Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Konsep perhitungan Laba/Rugi Komersial

Penjualan		Rp. Xxxxx
Harga Pokok Pejualan		<u>(Rp.xxxxx)</u>
Laba Kotor		
Beban Pemasaran	Rp.xxxxx	
Beban Administrasi	<u>Rp.xxxxx</u>	<u>(Rp.xxxxx)</u>
Total Beban		Rp.xxxxx
Laba Operasi		
Pendapatan Lain - lain	Rp.xxxxx	
Biaya Lain – lain	Rp.xxxxx	<u>Rp.xxxxx</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp.xxxxx

Perhitungan laba / rugi menurut pasal 16 ayat (1).
 Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Tabel 2.3 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal

Pendapatan usaha (ps. 4 ayat 1)		Rp. Xxxxx
Biaya – biaya :		
Pasal 6 ayat 1 (Pengurang Objek pajak)	Rp. xxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf c (Dana Cadangan)	Rp. xxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf d (Premi Asuransi)	Rp. xxxxx	
Pasal 9 ayat 1 huruf e (Penghasilan yang diberikan atas jasa yang dilakukan dalam bentuk natura)	Rp. xxxxx	
Jumlah seluruh penghasilan		Rp. Xxxxx
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)		Rp. Xxxxx
Pasal 6 ayat 2 (penghasilan yang didapat kerugian tersebut dikompensasikan berturut – turut sampai dengan 5 tahun)		<u>Rp. Xxxxx</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. Xxxxx

Urutan perhitungan laba/Rugi di atas, seakan - akan tidak mempedulikan mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan mana yang merupakan biaya - biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain perhitungan

versi undang – undang Pajak Penghasilan tidak membedakan antara penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional perusahaan dan juga tidak membedakan biaya operasional perusahaan.

2.1 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Buku Undang – undang Pajak lengkap (2008, 3) UU KUP pasal 1 ayat (3) tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(2008, 3)

2.2.1 Objek Pajak

UU PPh Pasal 4 Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung Pajak. Yang menjadi Objek PPh adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- a. Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2 Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). Pajak - pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2).

2.1.3 Pengecualian Sebagai Objek Pajak

UU PPh pasal 4 ayat (3), yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Bantuan, sumbangan dan zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau pendidikan atau sosial

atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh menteri keuangan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- d. Pengantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada hal diatas dalam bidang - bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham - saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Dihapus
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - l. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor - sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - m. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidika dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak

- diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.-

2.1.4 Pengurangan Objek Pajak

UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan meliputi:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan untuk perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pengembangan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.5 Pengecualian Sebagai Pengurangan Objek Pajak

UU PPh pasal 9 ayat (1), pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya - biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,

seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan bea siswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi.
- e. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat.
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komandeter yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang - undangan dibidang perpajakan.

2.1.6 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara perhitungan biasa dengan contoh sebagai berikut:

Perbedaan bruto	Rp xxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara	<u>Rp (xxx)</u>
Penghasilan	
Laba usaha (<i>penghasilan neto usaha</i>)	Rp xxx
Penghasilan lainnya	Rp xxx
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya	<u>(Rp xxx)</u>
Kompensasi kerugian	<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan kena pajak	Rp xxx

2.1.7 Tarif Pajak Badan

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28%. Tarif PPh tersebut menjadi 25% mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa

efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah tarif dipotong PPh pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10 % dari penghasilan bruto. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

2.3. Penelitian Sebelumnya dan Paradigma Penelitian

2.3.1 Penelitian Sebelumnya

Dilakukan sebagai bahan perbandingan penelitian untuk mengambil sebagian data dari penelitian terdahulu. Untuk dilakukan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh.

1. Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan. Erni Ramayanti BR Jawak,2010.

Tujuan mengetahui dengan jelas pelaksanaan Tax planning dalam mengefesienkan pajak penghasilan terutang yang

diterapkan PT Agricon Putra Citra Optima (APCO) berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Lokasi PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan yang bergerak dibidang usaha pengendalian hama dan rayap. Beralamat di JL. Perniagaan Baru No. 38 C Medan.

Data primer data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan Data sekkunder data yang telah ada di perusahaan. Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dipilih karena faktor kondisi, seperti keberadaan sampel pada tempat dan waktu yang tepat. Metode Deskriptif dan Metode Komperatif. Hasil penelitian Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefesienkan pembayaran pajak terhutang. Dengan melaksanakan tax planning, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat mengupdate peraturan perpajakan yang berlaku.

Keterbatasan penelitian PT Agricon Putra Citra Optima belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Jadi secara langsung tidak melakukan kegiatan tax planning. Masih terdapat opsi fiskal yang belum ditempuh perusahaan yang dapat lebih menghemat beban pajak penghasilannya.

2. Implementasi Tax Planning PPh Badan pada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT "X" di Surabaya. Rindi Puspita Sari, 2011

Tujuan Untuk menerapkan tax planning PPh Badan khususnya pada biaya PPh Pasal 21 dalam upaya tax saving pada perusahaan jasa cleaning service PT "X" di Surabaya. Data Sekunder, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian PT "X" sebelum menerapkan tax planning menggunakan metode net basis dalam perhitungan biaya PPh pasal 21, akan tetapi setelah tax planning dengan menggunakan metode gross up dan menghasilkan tax saving sebesar Rp 1.612.268.

3. Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT Semen Bosowa Maros di Makassar. NURJANNAH, 2013.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bahwa apakah strategi tax planning yang diterapkan pada perusahaan dapat bermanfaat untuk penghematan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Lokasi penelitian PT Semen Bosowa Maros Makassar. Data Primer dan Data Sekunder. Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa analisis statistik.

Hasil penelitian dengan adanya perencanaan pajak pada PT Semen Bosowa Maros maka wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebesar jumlah yang sudah direncanakan atau dengan kata lain wajib pajak badan akan lebih patuh dalam melunasi ataupun membayar pajak tepat pada waktunya.

Saran melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, berdasarkan pengamatan dan - data yang diperoleh dari perusahaan serta teori yang ada maka penulis memberikan saran agar penerapan tax planning pada PT Semen Bosowa Maros tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan undang - undang perpajakan yang berlaku.

4. Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Badan sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang pada PT X Surabaya Irnia Dina Rosa, 2014.

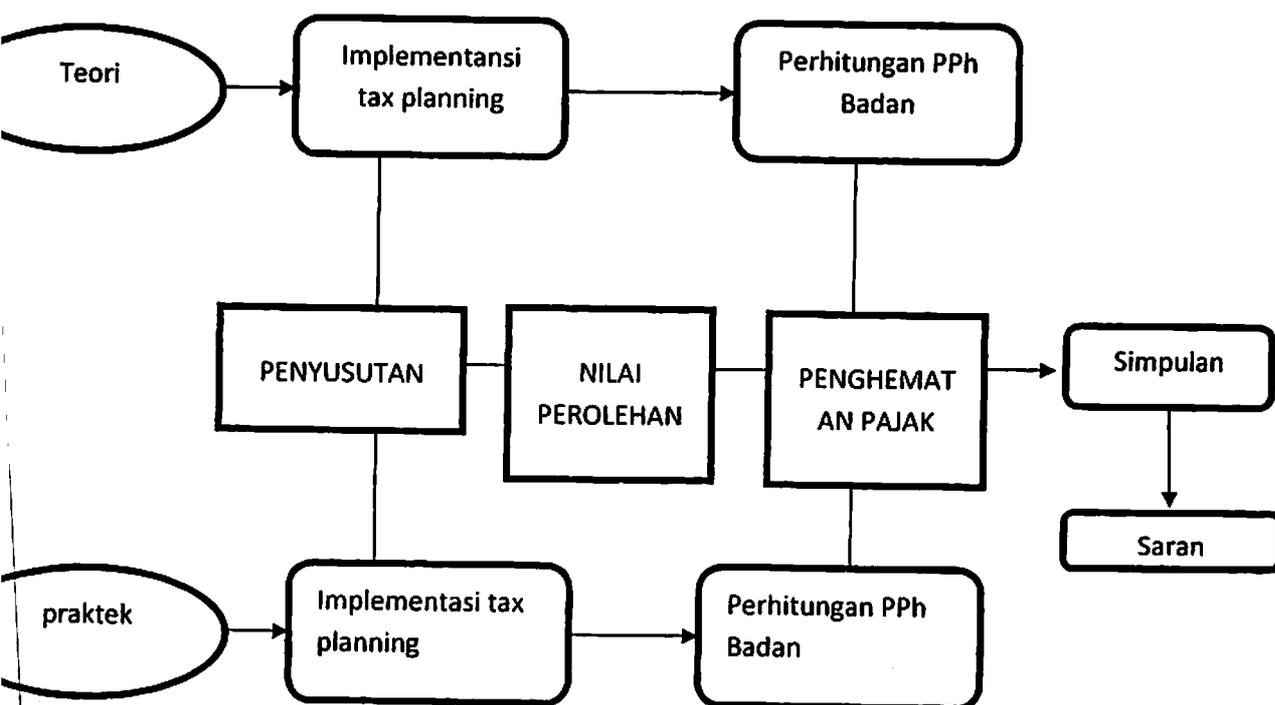
Tujuan untuk menganalisis tentang Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Badan di PT X sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lokasi penelitian pada skripsi ini tidak dipublikasikan secara jelas. Data primer didapatkan penulis dari perusahaan yang bersangkutan, sedangkan data sekunder didapatkan penulis dari buku-buku teori dan literatur.

Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis data perencanaan pajak atas aktiva tetap pada PT X Surabaya

sebenarnya dapat dilakukan dengan cara memilih metode penyusutan aktiva tetap secara tepat, yaitu dengan menggunakan Metode Penyusutan Saldo menurun. Keterbatasan penelitian, penelitian ini dibatasi pada perencanaan pajak berdasarkan penyusutan aktiva tetap yang digunakan perusahaan.

2.3.2 Paradigma Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian yang dilakukan pada PT Citra Abadi Sejati ini digolongkan dalam studi kasus. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variabel - variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

a. Objek Penelitian

Sebagai objek yang dianalisis dalam penelitian adalah Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT Citra Abadi Sejati. Saya memilih Tax Planning Perhitungan PPh badan mengingat pentingnya penerapan Tax Planning dalam perencanaan peminimalan pembayaran pajak badan. Dengan kata lain penerapan tax planning mempengaruhi beban pajak penghasilan badan.

b. Unit analisis

Yang diteliti adalah suatu organisasi, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari bagian pajak yang berada di dalam PT Citra Abadi Sejati.

c. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Citra Abadi Sejati yang bergerak dibidang garment beralamat di jalan Raya Kedung Halang No 263 Km 52 Bogor 16710. Tempat penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kualitatif yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan ataupun tulisan.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai objek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Penjabaran masing – masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Variabel Utama	Indikator	Ukuran	Skala
Variable Independen (X) Penerapan Perencanaan Pajak Sub Variabel: a. Aspek Formal	a. Kepatuhan wajib pajak badan	a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mengisi dan memasukkan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak	Nominal
b. Aspek Material	b. Adanya biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Perpajakan.	b. Mengalihkan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan ke biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai UU PPh yang berlaku dengan rekonsiliasi fiskal.	Rasio
Perencanaan pajak untuk aset tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Harga perolehan • Estimasi masa manfaat • Estimasi nilai residu • Metode penyusutan 	Pengeluaran modal awal saat perolehan aset : <i>Harga Aset + Biaya-biaya yang menyertai</i> Pertimbangan Tahun Nilai Tunai/Nol Metode Garis Lurus : $\frac{HP - NR}{UE}$ Metode Saldo Menurun : <i>Tarif x Nilai Buku Awal Tahun.</i>	

Variable Dependen (Y) PPH Badan			
Penghasilan Bruto	Pasal 4 ayat 1	Penghasilan	Rasio
Pengenaan pajak penghasil	Pasal 4 ayat 2	Pajak Penghasilan final	
Natura atau kenikmatan	Pasal 4 ayat 3	Pengecualian Sebagai Objek Pajak	
Beban- beban yang dikurangkan penghasil bruto	Pasal 6	Pengurangan Objek Pajak	
Biaya – biaya yang tidak boleh dibebankan	Pasal 9	Pengecualian Sebagai Pengurang Objek Pajak	
Perhitungan pajak	Pasal 17	Tarif Pajak	Rasio
	Penghematan Beban pajak penghasilan badan	Jumlah PPh Badan yang dapat dihemat	

3.5. Metode Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah rincian laporan laba rugi PT Citra Abadi Sejati. Sampel yang di ambil adalah rincian laporan laba rugi yang berakhir pada 31 Desember 2012.

3.6. Metode Pengumpulan Data

- Survey yaitu mewawancarai langsung bagian pajak yang ada di PT Citra abadi sejati
- Observasi yaitu mendatangi PT Citra Abadi Sejati
- Analisis dan Pengolah Data

3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat implementasi *tax planning* terhadap perhitungan PPh badan pada PT Citra Abadi Sejati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Citra Abadi Sejati

PT Citra Abadi Sejati merupakan perusahaan yang memproduksi barang sesuai dengan pesanan dari pelanggan (*Buyer*), dan setiap *buyer* memberikan nama *style* yang akan dipesan dengan nama *style* yang berbeda beda dalam setiap pesanan atau disebut juga *buyer style*, kemudian untuk mempermudah pendataan di perusahaan, maka *buyer style* tersebut dirubah menjadi *style* baru sesuai dengan sistem yang dipakai oleh perusahaan, dengan sebutan *movex style*. Pada kesempatan kali ini penulis akan menganalisa perhitungan biaya produksi *Jacket* untuk *style 0043-12*.

4.1.2. Kegiatan Usaha

Sebelum itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dalam pembahasan ini:

1. FOB (*Free On Board*) adalah harga pokok jual yang disetujui oleh pembeli. Merupakan harga pokok penjualan yang sudah disetujui antara perusahaan dengan *buyer*. Harga pokok penjualan untuk jaket *style 0043-12* seharga \$31.31 / pcs.
2. *Buyer* adalah pelanggan
3. *Fabric* Merupakan bahan baku utama pembuatan jaket dengan *style 004312*.

Fabric terdiri dari:

- a. Kain jenis BS-2463 Circ Knit Microfleece 100% Bon Sld
Brusi. Merupakan jenis kain utama yang digunakan untuk bagian tubuh (*Body*) mulai dari pembentukan bagian lengan kiri-kanan, dan bagian *body* depan-belakang, serta bagian penutup kepala seperti kerudung atau topi jaket. Tipe kain ini merupakan bahan sejenis kain rajutan.
- b. Kain jenis WI4016 100% Poly Pln Solid Tricot Microdenier Bruhed Merupakan jenis tipe kain satu warna untuk bagian pocket back atau kain pengganti untuk dibuat dibagian kantung atau saku di kiri-kanan bagian dalam jaket. Namun kain jenis ini pun digunakan pula untuk melapisi bagian pinggir ataupun sisi-sisi permukaan ritsleting (*Zipper*) karena kainnya lebih tipis agar mudah saat penjahitannya.
- c. Kain jenis WI54253 100% Poly Jacquard Prnted Merupakan jenis tipe kain yang digunakan untuk melapisi kain utama dibagian dalam seluruh tubuh (*Body*) jaket yang sudah disesuaikan. Dimana fungsi bahan pelapis ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang rapih, kenyamanan, kehalusan terhadap kulit, serta menutupi konstruksi pada bagian dalam jaket untuk menahan bentuk aslinya.
- d. Kain jenis Poly 100% Circ Rib 1x1 Yd 3” Merupakan jenis kain tambahan dengan variasi warna yang sesuai dengan permintaan buyer, digunakan untuk variasi

jaket dibagian lengan kiri dan kanan agar jaket yang dihasilkan terkesan mewah atau bagus.

4. Interlining Non Woven Non Fusible NS2198 Merupakan jenis bahan pelapis berupa kain yang melapisi sebagian maupun keseluruhan bahan utama, untuk membantu siluet pada jaket. Bagian interlining ini digunakan pada pakaian ataupun jaket seperti lingkaran leher, kerah belahan tengah muka, penutup saku dan ujung bawah jaket agar terlihat agak kaku.
5. Accessories Merupakan semua bahan baku penunjang yang digunakan selain kain utama pada pembuatan jaket, untuk melengkapi semua bagian-bagian yang diperlukan saat produksi mulai dikerjakan.

Aksesoris terdiri dari:

- a. Eyelet G09-EY01+Washer

Merupakan ring besi yang berlubang kecil dengan lapisan washer sebagai tempat masukan tali yang dilekatkan dibagian kiri-kanan pada kerudung jaket atau topi.

- b. Label G08-MSL, Label G09-CC, Label G09-IL02, dan Label Size

Merupakan label yang menerangkan atau menandakan mengenai ukuran jaket (Size) serta informasi dari jaket yang diproduksi.

c. Lot Label Style

Merupakan keterangan garmen yang digunakan untuk menjelaskan asal bahan dan proses yang dikerjakan pada produk jaket tersebut yang biasa disebut Brand Label.

d. Main Label Interior Country

Merupakan label paling utama yang biasanya diletakan dibagian belakang jaket dekat leher. Label ini merupakan label yang menjelaskan nama-nama desainer ataupun nama-nama industri/asal negara yang memproduksinya dan juga untuk menunjukan merek dan kualitas produknya.

e. Stopper Bead G09CB01

Merupakan jenis aksesoris yang digunakan sebagai penahan tali pada jaket atau dapat dikatakan sebagai pengunci tali (*Cord Lock*).

f. Stopper Plastic CL34MA

Merupakan jenis aksesoris yang digunakan untuk pengikat tali pada kerudung/topi jaket biar terkesah rapih.

g. Thread

Merupakan benang sebagai bagian dari aksesoris yang paling penting, digunakan untuk proses jahit (*Sewing*) yang menghubungkan tiap-tiap bagian dari hasil pemotongan kain mulai dari bagian kerah, lengan kiri-kanan, dan bagian tubuh (*Body*) depan-belakang untuk digabungkan antara masing-masing bagian hingga membentuk jaket.

h. Zipper Cnfc 51DFSP074 (*Pocket Zipper*)

Merupakan ritsleting yang digunakan dibagian kantung atau saku yang penggunaannya dipakai pada kiri-kanan jaket.

i. Zipper Cnfc 51DFSP074 (*Front Zipper*)

Merupakan ritsleting yang digunakan untuk membuat bukaan jaket yang diletakan pada bagian *body* depan jaket, agar jaket tersebut mudah dipasang atau dibuka saat akan dipakai.

j. Drawcord 3mm

Merupakan ukuran tali karet yang akan digunakan dibagian kerudung atau topi jaket.

k. Embroidery EMB-01 dan EMB-02

Merupakan bordiran berbentuk gambar dibagian dada kiri dan bordiran berbentuk tulisan dibagian belakang.

6. Packing (Bagian Kemasan)

Merupakan semua bahan baku pembungkus dari suatu produk agar terlihat indah dan menarik biasanya mempunyai ukuran standar yang sesuai dengan produk agar mudah dibawa, dan melindungi produk tersebut dari lingkungan.

Packing terdiri dari

a. Hangtag Board Man's Active 11-Mact, Packg Core

Hangtag Board 11, UPC Hangtag HT4-SPY 0043-12

Hangtag tersebut pada umumnya sama seperti label, ditempel pada bagian dalam jaket, dibagian samping atau

bagian lainnya yang disesuaikan dengan model jaket. Hangtag ini terbuat dari kertas tebal, plastik yang bertuliskan merek usaha jaket, ukuran jaket, dan dilengkapi dengan cara petunjuk pemakaian.

b. Stiker UCC128

Merupakan sticker atau gambar tempel yang bertanda label barcode untuk keterangan harga per satuan jaket yang ditempel pada Hangtag.

c. Stiker UPC STK08 Sticker 0043-12

Merupakan sticker yang digunakan untuk keterangan dari garmen, seperti label pemeliharaan cara mencuci suhu mesin tertentu, cara pengeringan dengan suhu tertentu, dan cata setrika dengan suhu tertentu.

d. Polybag 09-BIO-Logo PB 18x33.5"

Merupakan ukuran kemasan kantong plastik yang digunakan saat jaket selesai di produksi untuk dikemas dengan cara dilipat.

e. Carton Box

Merupakan biaya bahan baku untuk tempat penyimpanan jaket yang siap untuk dikirim kepada buyer.

f. Layer

Merupakan lapisan dalam bagian carton box untuk melindungi jaket saat kemasan karton box dibuka dengan pisau/carter agar jaket tidak teriris.

g. Lain-lain (Other)

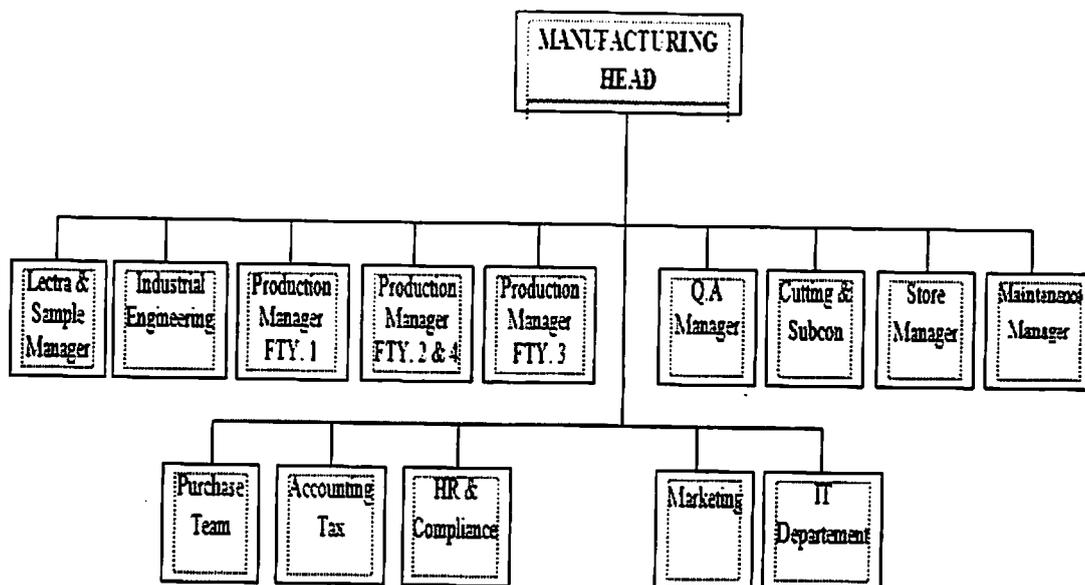
Merupakan biaya bahan baku lain-lain seperti lakban atau solatip untuk pengemasan perekan carton box.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Setiap organisasi dalam bentuk apapun memerlukan struktur organisasi, karena dengan adanya struktur organisasi tersebut setiap fungsi dapat diarahkan pada satu tujuan organisasi yang bersangkutan dan dapat menegaskan peran serta posisi setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi yang tepat, sangat membantu untuk kelancaran usaha dan operasi perusahaan. Struktur organisasi merupakan kerangka dasar yang menunjukkan hubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lain, serta lebih jelas wewenang dan tanggung jawab dari masing – masing bagian agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan.

PT. Citra Abadi Sejati memiliki struktur organisasi dan staff, dimana setiap bagian terdapat staf ahli dalam bidangnya masing - masing dan membantu atasan dalam mengambil keputusan. Struktur organisasi dapat membuat suatu kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta meningkatkan tingkat kerjasama untuk meningkatkan produktivitas dalam internal perusahaan.



Deskripsi Pembagian Tugas Perusahaan PT. Citra Abadi Sejati

Berikut diuraikan secara singkat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dari struktur organisasi PT. Citra Abadi Sejati .

1. Lectra dan sample manager Tugas Lectra Manager adalah mengawasi dan memberikan arahan kepada bawahan bagaimana proses yang akan dilakukan, serta menyetujui hasil akhir yang akan diberikan kebagian sample.

Sample Manager membantu lectra dalam menyelesaikan tugasnya dalam pembuatan pola yang akan dibuat menjadi baju,jaket ataupun celana.

Adapun tugas sample manager ialah mengawasi bawahannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mendesain gambar yang telah ditentukan dibagian sebelumnya.

2. Industrial Engineering bertugas dalam Menyelesaikan semua permasalahan teknis yang terjadi dalam mesin perusahaan, menyediakan dukungan terhadap department operasi untuk kelancaran operasi, membuat dan memelihara pedoman standar teknis bagi pengoperasian.
3. Tugas Production Manager FTY. 1 adalah mengawasi proses produksi dalam pembuatan celana sampai proses akhir dan Melakukan pengecekan barang agar tidak cacat pada saat dicek
4. Production Manager FTY. 2 & 4 bertugas mengawasi proses produksi dalam pembuatan jaket hingga proses akhir dan Memberikan tanda apabila jaket tersebut sudah memenuhi syarat.
5. Production Manager FTY. 3 bertugas mengawasi proses produksi dalam pembuatan kemeja hingga proses akhir dan Melakukan pengecekan barang sudah sesuai proses produksi.
6. Q.A Manager bertugas melakukan pengecekan kualitas barang yang akan dikirim apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam proses produksi yang telah dilaksanakan .
7. Cutting & Subcon bertugas dalam melakukan pemotongan bahan dan Melakukan perhitungan barang yang dikeluarkan untuk proses produksi
8. Store Manager bertugas memberi tugas kepada bagian produksi masing – masing dan melakukan pengiriman barang untuk diekspor.

9. Maintenance Manager bertugas mengawasi proses pengerjaan perbaikan mesin, listrik maupun bangunan.
10. Marketing ialah melakukan peramalan pasar dan prediksi jumlah produk yang akan dijual dan melakukan metode pemasaran yang baik agar produk dapat diterima pasar.
11. IT Departement bertugas Memastikan pemeliharaan system IT dilaksanakan sesuai ketentuan, mengelola pengembangan *platform software* perusahaan, dan memfasilitasi perusahaan dengan solusi IT berdasarkan kebutuhan.
12. Purchase Team bertugas Melaksanakan penjualan produk – produk sesuai target yang ada
13. Accounting Tax bertugas mengatur gaji para karyawan, mengusulkan kebijakan prosedur yang ada kaitannya dengan gaji dan perpajakan. Menyelenggarakan, memelihara sistem administrasi pajak dengan tujuan untuk mempermudah mengetahui dan meyakinkan kewajiban perpajakan apakah sesuai dengan peraturan yang ada.
14. Tugas HR & Compliance adalah mempunyai wewenang untuk melakukan penerimaan dan pemberhentian karyawan. Melakukan training ata pendidikan kepada karyawan guna meningkatkan kualitas perusahaan dan Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan industrial karyawwan termasuk pengobatan, Jamsostek.

4.2. Kebijakan Akuntansi pada PT. Citra Abadi Sejati .

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pengukuran dan Pengakuan Aset Tetap Pada PT. Citra Abadi Sejati.

Aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun sendiri nilainya diakui sebesar akumulasi total biaya aset saat pengerjaan pembangunan atau pembuatan dan pada saat aset berada pada lokasi dan keadaan yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen perusahaan.

Sedangkan pengakuannya aset tetap yang dibeli diakui sebesar biaya perolehannya. Yang termasuk dalam biaya perolehannya adalah bea masuk, biaya produksi, biaya pembuatan, biaya mesin, biaya perbaikan, upah pegawai, biaya pengangkutan dan pemindahan.

Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan diakui pada saat persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembaharuan sewa, nilai tunai angsuran dari jumlah pembayaran minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.

4.2.2. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat di klasifikasikan sebagai investasi jangka panjang dan aset lain-lain. Aset tetap dapat berupa tanah, gedung, peralatan, perlengkapan, kendaraan dan sebagainya. Dari berbagai macam aset yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok ditinjau dari beberapa sudut pandang :

1. Ditinjau dari umurnya,
 - a. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas, misalnya tanah.
 - b. Aset tetap yang mempunyai umur terbatas.
 - 1) Aset tetap berwujud yang dapat diperbarui, misalnya gedung, kendaraan, mesin.
 - 2) Aset tetap yang tidak dapat diperbaharui, misalnya konsesi tanah tambang.
2. Ditinjau dari mobilitasnya,
 - a. Aset tetap berwujud bergerak, yaitu aset tetap yang dapat dengan mudah berpindah atau dipindahkan. Misalnya kendaraan, peralatan.
 - b. Aset tetap berwujud tidak bergerak, misalnya tanah, gedung.
3. Ditinjau dari kemampuan mengembangkan diri,
 - a. Aset tetap berwujud yang tidak dapat mengembangkan diri, misalnya tanah, gedung.
 - b. Aset tetap berwujud yang dapat mengembangkan diri
4. Ditinjau dari Undang-undang perpajakan
 - a. Golongan I yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis sampai 4 tahun, misalnya peralatan, mebel, kendaraan, truk ringan dan lain-lain.
 - b. Golongan II yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis diatas 4 tahun sampai dengan 8

- tahun misalnya mebel dan peralatan yang terbuat dari logam, truk berat, mobil tangki dan lain-lain.
- c. Golongan III yaitu aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 8 tahun sampai 20 tahun, misalnya mesin-mesin yang menghasilkan peralatan, mesin-mesin produksi dan lain-lain.
 - d. Golongan IV yaitu aset tetap berwujud yang berupa tanah dan bangunan.

4.2.3. Cara Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh perusahaan umumnya dengan bermacam macam cara baik dibeli sendiri, dibangun ataupun donasi dari pemerintah berikut ini cara perolehan aset tetap :

1. Perolehan aktiva tetap dengan tunai (*cash*).
2. Perolehan aktiva tetap dengan cicilan (*installment payment*).
3. Perolehan dengan sewa guna usaha (*leasing*).
4. Perolehan dengan pertukaran.
5. Perolehan dengan membangun sendiri.
6. Perolehandari hibah, bantuan, sumbangan, atau pemberian.
(Thomas Sumarsan; 2013, 151)

Hans Kartikanadi, dkk (2012; 317) menyatakan perolehan aset tetap dan PSAK yang relevan terhadap perolehanya tersebut :

Pembelian	Dibangun Sendiri	Pertukaran dengan aset Non-moneter
PSAK 16	PSAK 16	PSAK 16
Kombinasii Bisnis	Sewa Pembiayaan	Hibah Pemerintah
PSAK 22	PSAK 30	PSAK 61

PSAK No. 30 tentang Sewa mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sesuai PSAK 30 terkait dengan akuntansi leasing maka perlakuan akuntansi untuk aset dalam sewa pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual:

1. disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan dari pada penggunaan lebih lanjut
2. diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset tersebut
3. diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan adanya perubahan penggunaan aset.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi Leasing disesuaikan dengan jenis sewanya masing-masing:

1. **Financial Lease** : selisih lebih hasil penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual *lessee*, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa
2. **Operating Lease** : jika transaksi terjadi pada nilai wajar maka laba/rugi harus diakui tetapi jika terjadi dibawah nilai wajar maka laba/rugi harus diakui segera kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa dimasa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Jika harga

jual diatas nilai wajar selisih lebih tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Kebijakan Pajak Untuk Penyusutan

Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan secara rasional tiap periode dimana aset tetap tersebut dinikmati manfaatnya. Kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu, keadilan pajak, kebijakan ekonomi, dan administrasi. Tiga hal tersebut sebagai berikut:

a. Keadilan Pajak (*tax equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagai mana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur atau jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibanding dengan yang lainnya

b. Kebijakan Ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (*return on investment - ROI*) besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan

peraturan tertentu secara selektif, untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi:

- 1) Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas
- 2) Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu
- 3) Penyusutan berdasarkan jenis aktiva penyusutan berdasarkan alokasi (terpencil)

c. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

4.3.2. Penyusutan

Dalam memilih metode penyusutan perlu dipilih dengan beberapa pertimbangan agar metode yang digunakan benar benar memberikan manfaat bagi perusahaan.

Metode penyusutan dapat dipilih dengan pertimbangan berikut:

1. Kontinuitas usah. Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode penyusutan saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.
2. Profitabilitas usah. Jika sedang dalam masa infestasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar di awal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lainnya sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu, disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.

3. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi fiskal. (Yustinus Prastowo; 2011; 274).

Dalam akuntansi ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipergunakan untuk menyusutkan suatu aset, beberapa metode tersebut menurut Hery (2011; 177-184) antara lain :

Berdasarkan waktu :

1. Metode garis lurus (*straight method*)

metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama selama umur aktiva.

2. Metode pembebanan yang menurun (dipercepat) :

- a. Metode jumlah angka tahun

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun dalam setiap tahun berikutnya. Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan suatu seri pecahan ke nilai perolehan aktiva yang dapat disusutkan. Besarnya nilai perolehan aktiva yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan aktiva dengan estimasi nilai residunya. Pecahan yang dimaksud didasarkan pada masa manfaat aktiva bersangkutan. Unsur pembilang dari pecahan ini merupakan angka tahun yang diurutkan secara berlawanan (mencerminkan banyaknya tahun dari umur ekonomis yang masih tersisa pada awal tahun bersangkutan) sedangkan unsur

penyebut dari pecahan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh angka tahun dari umur ekonomis aktiva seperti pada rumus berikut :

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

* variabel n yang dimaksud dalam rumus ini adalah lamanya estimasi masa manfaat aktiva

b. Metode saldo menurun ganda

Metode ini menghasilkan suatu beban penyusutan periodik yang menurun selama estimasi umur ekonomis aktiva. Beban penyusutan periodik dihitung dengan cara mengalikan suatu tariff prosentase (konstan) ke nilai buku aktiva yang kian menurun.

Berdasarkan penggunaan :

1. Metode jam jasa (*service hours method*)

Teori yang mendasari metode ini adalah bahwa pembelian suatu aktiva menunjukkan pembelian sejumlah jam jasa langsung. Dalam menghitung besarnya beban penyusutan metode ini membutuhkan estimasi umur aktiva berupa jumlah jam jasa yang dapat diberikan oleh aktiva bersangkutan. Harga perolehan yang dapat disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total jam jasa, menghasilkan besarnya tarif penyusutan untuk setiap

jam pemakaian aktiva. Pemakaian aktiva sepanjang periode (jumlah jam jasanya) dikali dengan tarif penyusutan tersebut akan menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

2. Metode unit produksi (*productive output method*)

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa aktiva yang diperoleh diharapkan dapat memberi jasa dalam bentuk hasil unit produk tertentu. Metode ini memerlukan suatu estimasi mengenai total unit produk yang dapat dihasilkan aktiva. Harga perolehan yang disusutkan (harga perolehan dikurangi dengan estimasi nilai residu) dibagi dengan estimasi total output, menghasilkan besarnya tarif penyusutan aktiva untuk setiap unit produksinya. Jumlah unit produksi yang dihasilkan selama suatu periode dikalikan dengan tarif penyusutan per unit menghasilkan besarnya beban penyusutan periodik.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, metode penyusutan yang diperbolehkan hanya dua yaitu :

1. Metode garis lurus/*straight line method* (untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan).

Beban penyusutan dialokasikan berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama, sepanjang masa

manfaat aset tetap. Beban penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Cara menghitung persentase tarif penyusutan dengan cara :

$$\frac{100}{\text{Masa manfaat aset tetap}} = \text{Tarif Penyusutan}$$

2. Metode saldo menurun/*declining balance method* (untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus).

Pada metode saldo menurun, biaya depresiasi dari tahun ke tahun semakin menurun. Pembebanan yang makin menurun didasarkan pada anggapan bahwa semakin tua, kapasitas aset tetap, dalam memberikan jasanya, juga akan makin menurun. Biaya depresiasi pertahun dihitung dengan cara mengalikan nilai buku aset pada awal tahun dengan tarif depresiasi. Biasanya tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus. Beban penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Penyusutan} = \text{Nilai Buku Awal Periode}$$

Berdasarkan pernyataan diatas, dalam menggunakan metode yang dipakai pada aset tetap, maka harus dilihat dahulu karakteristik aset tersebut, karena berbeda karakteristik, maka berbeda pula metode penyusutan yang dipakai sehingga akan memberikan pengaruh di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan neraca yang berimbas pada besarnya tarif pada pengenaan pajak.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straightline method*) berdasarkan umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

Aset Group	Useful Life (Tahun)
Bangunan	20
Mesin	4
Kendaraan	4
Inventaris Kantor	4

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

4.3.3. Nilai Perolehan Aset Tetap

Nilai perolehan aset tetap pada PT. Citra Abadi Sejati dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5
Daftar Aset tetap PT. Citra Abadi Sejati
Akhir tahun 2010 – 2013
(Disajikan dalam US Dollar)

no.	Keterangan	Nilai Perolehan			
		2013	2012	2011	2010
	Tanah	\$ 2,407,199.27	\$ 2,442,483.27	\$ 1,609,458.47	\$ 1,609,458.47
	Bangunan dan Listrik	\$ 10,743,091.38	\$ 10,500,112.74	\$ 820,435.67	\$ 8,202,238.81
	Masjid	\$ 37,767.53		\$ 37,767.53	
	Mesin	\$ 21,940,523.93	\$ 20,627,793.00	\$ 17,444,387.30	\$ 17,444,387.29
	Inventaris kantor	\$ 4,292,202.80	\$ 4,129,587.75	\$ 3,709,504.28	\$ 3,641,724.72
	Kendaraan	\$ 849,317.76	\$ 940,589.45	\$ 1,116,372.59	\$ 1,025,453.28
	Sub Total	\$ 40,270,102.67	\$ 38,640,566.21	\$ 24,737,925.84	\$ 31,923,262.57
	Akumulasi Penyusutan	\$ (24,674,487.34)	\$ (23,015,963.57)	\$ (21,782,298.60)	\$ (20,324,043.25)
	Total	\$ 15,595,615.33	\$ 15,624,602.64	\$ 2,955,627.24	\$ 11,599,219.32

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Dari jumlah-jumlah yang tertera pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa PT. Citra Abadi Sejati memiliki aset tetap dari tahun 2010-2013 dengan kepemilikan langsung yang berupa tanah, bangunan dan listrik, masjid, mesin, kendaraan, Investaris kantor.

Adapun saldo awal, penambahan, pengurangan, reklasifikasi, dan saldo akhir yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2010-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, dan saldo Akhir
Aset Tetap PT. Citra Abadi Sejati 2010

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	\$ 1,551,593.47	\$ 57,865.00		\$ 1,609,458.47
Bangunan dan Listrik	\$ 7,816,700.30	\$ 597,898.71	\$ (212,360.20)	\$ 8,202,238.81
Masjid				
Mesin	\$ 17,444,387.29			\$ 17,444,387.29
Inventaris kantor	\$ 3,441,724.72	\$ 200,000.00		\$ 3,641,724.72
Kendaraan	\$ 900,000.39	\$ 225,453.00	\$ (100,000.11)	\$ 1,025,453.28
Sub Total	\$ 31,154,406.17	\$ 1,081,216.71	\$ (312,360.31)	\$ 31,923,262.57
Akumulasi Penyusutan	\$(18,824,007.00)	\$(1,500,036.25)		\$(20,324,043.25)
Total	\$ 12,330,399.17	\$ (418,819.54)	\$ (312,360.31)	\$ 11,599,219.32

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 7
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, dan saldo Akhir
Aset Tetap PT. Citra Abadi Sejati 2011

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	\$ 1,609,458.47			\$ 1,609,458.47
Bangunan dan Listrik	\$ 8,202,238.81	\$ 3,112.86	\$ (1,000.00)	\$ 8,204,351.67
Masjid		\$ 37,767.53		\$ 37,767.53
Mesin	\$ 17,444,387.29	\$ 0.01		\$ 17,444,387.30
Inventaris Kantor	\$ 3,641,724.72	\$ 67,779.56		\$ 3,709,504.28
Kendaraan	\$ 1,025,453.28	\$ 190,919.31	\$ (100,000.00)	\$ 1,116,372.59
Sub Total	\$ 31,923,262.57	\$ 299,579.27	\$ (101,000.00)	\$ 32,121,841.84
Akumulasi Penyusutan	\$(20,324,043.25)	\$(1,458,255.35)		\$(21,782,298.60)
Total	\$ 11,599,219.32	\$(1,158,676.08)	\$ (101,000.00)	\$ 10,339,543.24

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 8
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, dan saldo Akhir
Aset Tetap PT. Citra Abadi Sejati 2012

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	\$ 1,609,458.47	\$ 833,024.80		\$ 2,442,483.27
bangunan dan listrik	\$ 8,204,351.67	\$ 4,295,761.07	\$ (2,000,000.00)	\$ 10,500,112.74
Masjid	\$ 37,767.53		\$ (37,767.53)	\$ -
Mesin	\$ 17,444,387.30	\$ 4,295,405.70	\$ (1,112,000.00)	\$ 20,627,793.00
inventaris kantor	\$ 3,709,504.28	\$ 420,083.47		\$ 4,129,587.75
Kendaraan	\$ 1,116,372.59		\$ (175,783.14)	\$ 940,589.45
Sub Total	\$ 32,121,841.84	\$ 9,844,275.04	\$ (3,325,550.67)	\$ 38,640,566.21
Akumulasi Penyusutan	\$ (21,782,298.60)	\$ (1,233,664.97)		\$ (23,015,963.57)
Total	\$ 10,339,543.24	\$ 8,610,610.07	\$ (3,325,550.67)	\$ 15,624,602.64

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 9
Saldo Awal, Penambahan, Pengurangan, dan saldo Akhir
Aset Tetap PT. Citra Abadi Sejati 2013

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	\$ 2,442,483.27		\$ (35,284.00)	\$ 2,407,199.27
Bangunan dan Listrik	\$ 10,500,112.74	\$ 356,978.74	\$ (114,000.10)	\$ 10,743,091.38
Masjid		\$ 37,767.53		\$ 37,767.53
Mesin	\$ 20,627,793.00	\$ 1,324,730.93	\$ (12,000.00)	\$ 21,940,523.93
Inventaris Kantor	\$ 4,129,587.75	\$ 175,689.05	\$ (13,074.00)	\$ 4,292,202.80
Kendaraan	\$ 940,589.45	\$ 100,000.00	\$ (191,271.69)	\$ 849,317.76
Sub Total	\$ 38,640,566.21	\$ 1,995,166.25	\$ (365,629.79)	\$ 40,270,102.67
Akumulasi Penyusutan	\$ (23,015,963.57)	\$ (1,658,523.77)		\$ (24,674,487.34)
Total	\$ 15,624,602.64	\$ 336,642.48	\$ (365,629.79)	\$ 15,595,615.33

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, diolah penulis)

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung pada awal tahun 2010 sebesar \$ 31,154,406.17 dan mengalami penambahan aset sebesar \$1,081,216.71 serta mengalami pengurangan sebesar (\$ 312,360.31) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga nilai perolehan akhirnya menjadi \$ 31,923,043.25.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung pada awal tahun 2011 sebesar \$ 31,923,043.25 dan pada tahun ini mengalami penambahan aset sebesar \$ 299,579.27 dan mengalami pengurangan sebesar (\$ 101,000.00) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi \$ 32,121,841.84.

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung pada awal tahun 2012 sebesar \$ 32,121,841.84 dan pada tahun 2012 mengalami penambahan aset sebesar \$ 9,011,250.24 dan mengalami pengurangan sebesar (\$ 3,325,550.67) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi \$ 38,640,566.2.

Dan dari tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai perolehan aset tetap yang diperoleh dari kepemilikan langsung pada awal tahun 2013 sebesar \$ 38,640,566.21 dan pada tahun 2013 mengalami penambahan aset sebesar \$ 1,995,166.25 dan mengalami pengurangan sebesar (\$ 365,629.79) yang disebabkan terjadinya penjualan atau penarikan aset tetap, sehingga saldo akhirnya menjadi \$ 40,270,102.67.

4.3.4. Beban Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan yang dibebankan ke laporan laba rugi setiap periode akuntansi, sehingga menjadi pengurang untuk menentukan laba. Dengan

demikian, penyusutan akan berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh.

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line methode*), atau metode saldo menurun (*declining balance methode*) untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Penggunaan metode penyusutan aset tetap diisyaratkan taas asas (konsisten).

Berikut adalah perbandingan beban penyusutan aset tetap dari dua perusahaan yang dijadikan sample oleh penulis antara garis lurus dan saldo menurun dengan penetapan *discount factor* tahun 2012 sebesar 5,75%, tahun 2013 sebesar 7,50%, dan tahun 2014 sebesar 7,75%. Penetapan *discount factor* tersebut diambil dari tingkat suku bungun Bank Indonesia untuk tahun 2012 sampai 2014. Perhitungan untuk mendapatkan Faktor Bunga Nilai Sekarang (*Present Value Interest Factor/PVIF*) ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PVIF_{i,n} = 1 / (1 + i)^n$$

Dari rumus tersebut didapat perhitungan dan hasilnya dapat dilihat pada lampiran. Dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus Faktor Bunga Nilai Sekarang (*Present Value Interest Factor/PVIF*) hasilnya dapat digunakan untuk menghitung

penyusutan terhadap aset tetap yang ada, sehingga didapatkan Present Value (PV) dari kedua metode penyusutan yang dipakai yaitu garis lurus dan saldo menurun.

Tabel 10
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 6.5% Tahun 2010

No	Aset Tetap	Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Mesin	\$ 4,094,926.59	\$ 8,189,853.19
2	Inventaris Kantor	\$ 854,864.96	\$ 1,709,729.92
3	Kendaraan	\$ 169,851.21	\$ 4,814,313.46
4	Bangunan dan listrik	\$ 385,081.64	\$ 405,021.57
5	Masjid		
	Total	\$ 5,504,724.40	\$ 15,118,918.14

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 11
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value Sebesar 6% Tahun 2011

No	Aset Tetap	Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Mesin	\$ 4,114,242.28	\$ 4,114,242.29
2	Inventaris Kantor	\$ 874,883.08	\$ 890,868.83
3	Kendaraan	\$ 187,822.27	\$ 284,738.66
4	Bangunan dan listrik	\$ 387,006.54	\$ 371,841.80
5	Masjid	\$ 1,781.49	\$ 1,781.49
	Total	\$ 5,565,735.66	\$ 5,663,473.07

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 12
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value
Sebesar 5.75% Tahun 2012

No	Aset Tetap	Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Mesin	\$ 4,876,547.09	\$ 1,505,156.36
2	Inventaris Kantor	\$ 976,261.88	\$ 214,644.57
3	Kendaraan	\$ 146,961.64	\$ (14,337.34)
4	Bangunan dan listrik	\$ 496,459.23	\$ 461,661.90
5	Masjid	\$ (94.42)	\$ (89.29)
	Total	\$ 6,496,135.42	\$ 2,167,125.49

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 13
Perbandingan Besarnya Beban Penyusutan Aset Tetap Antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan Present Value
Sebesar 7.5% Tahun 2013

No	Aset Tetap	Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Mesin	\$ 5,102,447.70	\$ (2,705,934.81)
2	Inventaris Kantor	\$ 998,186.70	\$ (673,583.98)
3	Kendaraan	\$ 121,828.94	\$ 321,809.27
4	Bangunan dan listrik	\$ 499,678.67	\$ 440,822.42
5	Masjid	\$ 1,756.63	\$ 1,668.80
	Total	\$ 6,723,898.64	\$ (2,616,887.10)

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa present value sebesar 6,5% yang didapat dari suku bunga pada tahun 2010, biaya penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan present value sebesar \$ 5,504,724.40 dan metode saldo menurun dengan present value sebesar \$ 15,118,918.14 Terdapat selisih sebesar \$ 9,614,193.74.

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa present value sebesar 6% yang didapat dari suku bunga pada tahun 2011,

biaya penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan present value sebesar \$ 5,565,735.66 dan metode saldo menurun dengan present value sebesar \$ 5,663,473.07 Terdapat selisih sebesar \$ 97,737.41.

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa present value sebesar 5,75% yang didapat dari suku bunga pada tahun 2012, biaya penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan present value sebesar \$ 6,496,135.42 dan metode saldo menurun dengan present value sebesar \$ 2,167,125.49 Terdapat selisih sebesar \$ 4,329,009.93.

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa present value sebesar 7,5% yang didapat dari suku bunga pada tahun 2012, biaya penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dengan present value sebesar \$ 6,723,898.64 dan metode saldo menurun dengan present value sebesar \$ (2,616,887.10) Terdapat selisih sebesar \$ 4,107,011.54.

4.3.5. Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Ketentuan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan

4.3.5.1 Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Ketentuan Pajak dengan Metode Garis Lurus

Menurut ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 36 masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap bersifat pasti karena perhitungan mengikuti kelompok harta. Berdasarkan hal

tersebut maka perusahaan melakukan perhitungan penyusutan fiskal untuk pembebanan penyusutan aset untuk mengetahui besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada tahun 2010 sampai tahun 2013.

1. Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Ketentuan Pajak dengan Metode Garis Lurus Pada PT Citra Abadi Sejati

Tabel 14
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2010

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 3,641,724.72	25.00%	\$ 910,431.18	\$ 2,731,293.54
2	Kendaraan	\$ 1,025,453.28	25.00%	\$ 256,363.32	\$ 769,089.96
3	Mesin	\$ 17,444,387.30	25.00%	\$ 4,361,096.83	\$ 13,083,290.48
4	Bangunan dan Listrik	\$ 8,202,238.81	5%	\$ 410,111.94	\$ 7,792,126.87
5	Masjid		5%	\$ 0.00	\$ 0.00
	Jumlah	\$ 30,313,804.11		\$ 5,938,003.27	\$ 24,375,800.84

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 15
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2011

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 3,709,504.28	25.00%	\$ 927,376.07	\$ 2,782,128.21
2	Kendaraan	\$ 1,116,372.59	25.00%	\$ 279,093.15	\$ 837,279.44
3	Mesin	\$ 17,444,387.30	25.00%	\$ 4,361,096.83	\$ 13,083,290.48
4	Bangunan dan Listrik	\$ 820,435.67	5%	\$ 41,021.78	\$ 779,413.89
5	Masjid	\$ 37,767.53	5%	\$ 1,888.38	\$ 35,879.15
	Jumlah	\$ 23,128,467.37		\$ 5,610,476.20	\$ 17,517,991.17

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 16
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2012

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 4,129,587.75	25.00%	\$ 1,032,396.94	\$ 3,097,190.81
2	Kendaraan	\$ 940,589.45	25.00%	\$ 235,147.36	\$ 705,442.09
3	Mesin	\$ 20,627,793.00	25.00%	\$ 5,156,948.25	\$ 15,470,844.75
4	Bangunan dan Listrik	\$ 10,500,112.74	5%	\$ 525,005.64	\$ 9,975,107.10
5	Masjid		5%		
	Jumlah	\$ 36,198,082.94		\$ 6,949,498.19	\$ 29,248,584.75

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 17
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Garis Lurus Tahun 2013

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 4,292,202.80	25.00%	\$ 1,073,050.70	\$ 3,219,152.10
2	Kendaraan	\$ 849,317.76	25.00%	\$ 212,329.44	\$ 636,988.32
3	Mesin	\$ 21,940,523.93	25.00%	\$ 5,485,130.98	\$ 16,455,392.95
4	Bangunan dan Listrik	\$ 10,743,091.38	5%	\$ 537,154.57	\$ 10,205,936.81
5	Masjid	\$ 37,767.53	5%	\$ 1,888.38	\$ 35,879.15
	Jumlah	\$ 37,862,903.40		\$ 7,309,554.07	\$ 30,553,349.33

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2010 berdasarkan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 5,938,003.27 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 20120 sehingga dapat diketahui saldo akhir dari aset tetap pada tahun 2010 sebesar \$ 24,375,800.84.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2011 berdasarkan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 5,610,476.20 yang

diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2011 sehingga dapat diketahui saldo akhir dari aset tetap pada tahun 2011 sebesar \$ 17,517,991.17.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2012 berdasarkan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 6,949,498.19 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2012 sehingga dapat diketahui saldo akhir dari aset tetap pada tahun 2012 sebesar \$ 29,248,584.75.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2013 berdasarkan metode garis lurus menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 7,309,554.07 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2013 sehingga dapat diketahui saldo akhir dari aset tetap pada tahun 2011 sebesar \$ 30,553,349.33.

4.3.5.2 Penyusutan Aset Tetap berdasarkan Ketentuan Pajak dengan Metode Saldo Menurun.

Sama halnya dengan metode garis lurus, pada metode saldo menurunpun masa manfaat dan tarif penyusutan aset tetap bersifat pasti karena perhitungan mengikuti kelompok harta.

Tabel 18
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2010

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 3,641,724.72	50.00%	\$ 1,820,862.36	\$ 1,820,862.36
2	Kendaraan	\$ 1,025,453.28	50.00%	\$ 512,726.64	\$ 512,726.64
3	Mesin	\$17,444,387.30	50.00%	\$ 8,722,193.65	\$ 8,722,193.65
4	Bangunan dan Listrik	\$ 8,202,238.81	5%	\$ 410,111.94	\$ 7,792,126.87
5	Masjid		5%	\$ 0.00	\$ 0.00
	Jumlah	\$30,313,804.11		\$ 11,465,894.59	\$ 18,847,909.52

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 19
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2011

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 3,709,504.28	50.00%	\$ 1,854,752.14	\$ 1,854,752.14
2	Kendaraan	\$ 1,116,372.59	50.00%	\$ 558,186.30	\$ 558,186.30
3	Mesin	\$ 17,444,387.30	50.00%	\$ 8,722,193.65	\$ 8,722,193.65
4	Bangunan dan Listrik	\$ 820,435.67	5%	\$ 41,021.78	\$ 779,413.89
5	Masjid	\$ 37,767.53	5%	\$ 1,888.38	\$ 35,879.15
	Jumlah	\$ 23,128,467.37		\$ 11,178,042.25	\$ 11,950,425.13

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 20
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2012

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 4,129,587.75	50.00%	\$ 2,064,793.88	\$ 2,064,793.88
2	Kendaraan	\$ 940,589.45	50.00%	\$ 470,294.73	\$ 470,294.73
3	Mesin	\$ 20,627,793.00	50.00%	\$ 10,313,896.50	\$ 10,313,896.50
4	Bangunan dan Listrik	\$ 10,500,112.74	5%	\$ 525,005.64	\$ 9,975,107.10
5	Masjid		5%		
	Jumlah	\$ 36,198,082.94		\$ 13,373,990.74	\$ 22,824,092.20

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 21
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap
Menggunakan Metode Saldo Menurun Tahun 2013

No	Keterangan	Saldo	Tarif	Beban Penyusutan	Saldo Buku
1	Invetaris Kantor	\$ 4,292,202.80	50.00%	\$ 2,146,101.40	\$ 2,146,101.40
2	Kendaraan	\$ 849,317.76	50.00%	\$ 424,658.88	\$ 424,658.88
3	Mesin	\$ 21,940,523.93	50.00%	\$ 10,970,261.97	\$ 10,970,261.97
4	Bangunan dan Listrik	\$ 10,743,091.38	5%	\$ 537,154.57	\$ 10,205,936.81
5	Masjid	\$ 37,767.53	5%	\$ 1,888.38	\$ 35,879.15
	Jumlah	\$ 37,862,903.40		\$ 14,080,065.19	\$ 23,782,838.21

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2010 berdasarkan metode saldo menurun menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 11,465,894.59 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2010. Sehingga dapat diketahui saldo akhir pada tahun 2010 sebesar \$ 18,847,909.52

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2011 berdasarkan metode saldo menurun menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 11,178,042.25 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2011. Sehingga dapat diketahui saldo akhir pada tahun 2011 sebesar \$ 11,950,425.13

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2012 berdasarkan metode saldo menurun menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 13,373,990.74 yang diperoleh dari penjumlahan biaya

penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejai tahun 2012. Sehingga dapat diketahui saldo akhir pada tahun 2012 sebesar \$ 22,824.092.20.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa biaya penyusutan pada tahun 2013 berdasarkan metode saldo menurun menurut ketentuan perpajakan sebesar \$ 14,080,065.19 yang diperoleh dari penjumlahan biaya penyusutan aset tetap PT Citra Abadi Sejati tahun 2012. Sehingga dapat diketahui saldo akhir pada tahun 2012 sebesar \$ 23,782,838.21.

Dapat dilihat dari tabel 14, tabel 15, tabel 16, tabel 17 tarif yang digunakan untuk mengetahui beban pajaknya dilihat dari pengelompokan aset. Dalam kelompok aset mesin, kendaraan dan inventaris kantor masuk kedalam kelompok 1 dengan tarif sebesar 25, dan bangunan mempunyai tarif 5% karena termasuk kelompok aset yang bersifat permanen.

Dapat dilihat dari tabel 18, tabel 19, tabel 20, tabel 21 tarif yang digunakan untuk mengetahui beban pajaknya dilihat dari pengelompokan aset. Dalam kelompok aset, mesin, inventaris kantor dan kendaraan masuk kedalam kelompok 1 dengan tarif sebesar 50%, dan bangunan mempunyai tarif 5% karena termasuk kelompok aset yang bersifat pemanen.

4.3.5.3. Perbandingan Beban Penyusutan Aset Tetap atas Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan menggunakan *Present Value*.

Pemilihan metode penyusutan aset tetap berpengaruh untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan, karena penyusutan merupakan beban sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga akan menentukan besar kecilnya laba kena pajak. Setelah melakukan perhitungan dari kedua metode penyusutan diatas (metode garis lurus dan saldo menurun) dapat dilihat perbandingan besarnya beban pajak. Berikut ini adalah perbandingan penyusutan aset tetap antara metode garis lurus dan saldo menurun dengan penetapan *discount factor* yang diperoleh dari tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 22
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Garis Lurus dengan
Present Value 6,5% Tahun 2010

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 4,361,096.82	\$ 4,094,926.59
2	Inventaris Kantor	\$ 910,431.18	\$ 854,864.96
3	Kendaraan	\$ 181,363.24	\$ 169,851.21
4	Bangunan dan listrik	\$ 410,111.94	\$ 385,081.64
5	Masjid		
Total Beban Penyusutan		\$ 5,863,003.18	\$ 5,504,724.40

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 23
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Saldo Menurun dengan
Present Value 6,5% Tahun 2010

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 8,722,193.65	\$ 8,189,853.19
2	Inventaris Kantor	\$ 1,820,862.36	\$ 1,709,729.92
3	Kendaraan	\$ 512,726.64	\$ 4,814,313.46
4	Bangunan dan listrik	\$ 410,111.94	\$ 405,021.57
5	Mesjid		
Total Beban Penyusutan		\$ 11,465,894.59	\$ 15,118,918.14

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 22 dan tabel 23 diatas dapat diketahui bahwa dengan *present value* pada tahun 2010 sebesar 6,5% maka beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan *present value* sebesar \$ 5,504,724.40 dan metode saldo menurun dengan *present value* sebesar \$ 15,118,918.14 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 9,614,193.74

Tabel 24
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Garis Lurus dengan
Present Value 6% Tahun 2011

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 4,361,096.82	\$ 4,114,242.28
2	Inventaris Kantor	\$ 927,376.07	\$ 874,883.08
3	Kendaraan	\$ 197,729.82	\$ 187,822.27
4	Bangunan dan listrik	\$ 410,217.58	\$ 387,006.54
5	Masjid	\$ 1,888.38	\$ 1,781.49
Total Beban Penyusutan		\$ 5,898,308.67	\$ 5,565,735.66

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 25
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Saldo Menurun dengan
Present Value 6% Tahun 2011

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 4,361,096.83	\$ 4,114,242.29
2	Inventaris Kantor	\$ 944,320.96	\$ 890,868.83
3	Kendaraan	\$ 301,822.98	\$ 284,738.66
4	Bangunan dan listrik	\$ 394,152.31	\$ 371,841.80
5	Mesjid	\$ 1,888.38	\$ 1,781.49
Total Beban Penyusutan		\$ 6,001,393.08	\$ 5,663,473.07

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 24 dan tabel 25 diatas dapat diketahui bahwa dengan *present value* pada tahun 2011 sebesar 6% maka beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan *present value* sebesar \$ 5,565,735.66 dan metode saldo menurun dengan *present value* sebesar \$ 5,663,473.07 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 97,737.41.

Tabel 26
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Garis Lurus dengan
Present Value 5,75% Tahun 2012

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 5,156,948.55	\$ 4,876,547.09
2	Inventaris Kantor	\$ 1,032,396.94	\$ 976,261.88
3	Kendaraan	\$ 153,784.03	\$ 146,961.64
4	Bangunan dan listrik	\$ 525,005.64	\$ 496,459.23
5	Masjid		\$ (94.42)
Total Beban Penyusutan		\$ 6,868,135.16	\$ 6,496,135.42

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 27
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Saldo Menurun dengan
Present Value 5,75% Tahun 2012

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 1,591,702.85	\$ 1,505,156.36
2	Inventaris Kantor	\$ 226,986.63	\$ 214,644.57
3	Kendaraan	\$ (15,161.74)	\$ (14,337.34)
4	Bangunan dan listrik	\$ 488,270.47	\$ 461,661.90
5	Mesjid		\$ (89.29)
Total Beban Penyusutan		\$ 2,291,798.21	\$ 2,167,125.49

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 26 dan tabel 27 diatas dapat diketahui bahwa dengan *present value* pada tahun 2012 sebesar 5,75% maka beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan *present value* sebesar \$ 6,496,135.42 dan metode saldo menurun dengan *present value* sebesar \$ 2,167,125.49 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 4,329,009.9.

Tabel 28
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Garis Lurus dengan
Present Value 7,5% Tahun 2013

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ 5,485,131.28	\$ 5,102,447.70
2	Inventaris Kantor	\$ 1,073,050.70	\$ 998,186.70
3	Kendaraan	\$ 130,966.11	\$ 121,828.94
4	Bangunan dan listrik	\$ 537,154.57	\$ 499,678.67
5	Mesjid	\$ 1,888.38	\$ 1,756.63
Total Beban Penyusutan		\$ 7,228,191.04	\$ 6,723,898.64

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Tabel 29
PT Citra Abadi Sejati
Beban Penyusutan Fiskal Aset Tetap Menggunakan
Metode Saldo Menurun dengan
Present Value 7,5% Tahun 2013

NO	Daftar Aset	Beban Penyusutan	<i>Present Value</i>
1	Mesin	\$ (2,908,879.92)	\$ (2,705,934.81)
2	Inventaris Kantor	\$ (724,102.78)	\$ (673,583.98)
3	Kendaraan	\$ (345,944.96)	\$ 321,809.27
4	Bangunan dan listrik	\$ 473,884.10	\$ 440,822.42
5	Mesjid	\$ 1,793.96	\$ 1,668.80
Total Beban Penyusutan		\$ (3,505,043.56)	\$ (2,616,887.10)

(Sumber: PT. Citra Abadi Sejati, data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 28 dan tabel 29 diatas dapat diketahui bahwa dengan *present value* pada tahun 2013 sebesar 7,5% maka beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dengan *present value* sebesar \$ 6,723,898.64 dan metode saldo menurun dengan *present value* sebesar \$ 2,616,887.10 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 4,107,011.54.

4.3.5.4. Perbandingan Penghematan Beban Pajak antara Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan menggunakan *Present Value*.

Metode penyusutan aset yang dipakai oleh perusahaan merupakan kebijakan yang telah dipilih oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah hasil perbandingan penghematan beban pajak antara metode garis lurus dengan metode saldo menurun menggunakan *present value*.

Tabel 30
PT Citra Abadi Sejati
Perbandingan Penghematan Beban Pajak antara
Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun dengan *Present Value*
Tahun 2010-2013

No.	Aset Tetap 2010	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Selish	Penghematan PPh
1	Mesin	\$ 4,094,926.59	\$ 8,189,853.19	\$ 4,094,926.60	\$ 1,023,731.65
2	Inventaris Kantor	\$ 854,864.96	\$ 1,709,729.92	\$ 854,864.96	\$ 213,716.24
3	Kendaraan	\$ 169,851.21	\$ 4,814,313.46	\$ 4,644,462.25	\$ 1,161,115.56
4	Bangunan dan Listrik	\$ 385,081.64	\$ 405,021.57	\$ 19,939.93	\$ 4,984.98
5	Masjid				
	Total	\$ 5,504,724.40	\$ 15,118,918.14	\$ 9,614,193.74	\$ 2,403,548.44
lo.	Aset Tetap 2011	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Selish	Penghematan PPh
1	Mesin	\$ 4,114,242.28	\$ 4,114,242.29	\$ 0.01	\$ 0.00
2	Inventaris Kantor	\$ 874,883.08	\$ 890,868.83	\$ 15,985.75	\$ 3,996.44
3	Kendaraan	\$ 187,822.27	\$ 284,738.66	\$ 96,916.39	\$ 24,229.10
4	Bangunan dan Listrik	\$ 387,006.54	\$ 371,841.80	\$ (15,164.74)	\$ (3,791.19)
5	Masjid	\$ 1,781.49	\$ 1,781.49	\$ -	\$ -
	Total	\$ 5,565,735.66	\$ 5,663,473.07	\$ 97,737.41	\$ 24,434.35
o.	Aset Tetap. 2012	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Selish	Penghematan PPh
1	Mesin	\$ 4,876,547.09	\$ 1,505,156.36	\$ (3,371,390.73)	\$ (842,847.68)
2	Inventaris Kantor	\$ 976,261.88	\$ 214,644.57	\$ (761,617.31)	\$ (190,404.33)
3	Kendaraan	\$ 146,961.64	\$ (14,337.34)	\$ (161,298.98)	\$ (40,324.75)
4	Bangunan dan Listrik	\$ 496,459.23	\$ 461,661.90	\$ (34,797.33)	\$ (8,699.33)
5	Masjid	\$ (94.42)	\$ (89.29)	\$ 5.13	\$ 1.28
	Total	\$ 6,496,135.42	\$ 2,167,036.20	\$ (4,329,099.22)	\$ (1,082,274.81)
d.	Aset Tetap 2013	PV Garis Lurus	PV Saldo Menurun	Selish	Penghematan PPh
	Mesin	\$ 5,102,447.70	\$ (2,705,934.81)	\$ (7,808,382.51)	\$ (1,952,095.63)
	Inventaris Kantor	\$ 998,186.70	\$ (673,583.98)	\$ (1,671,770.68)	\$ (417,942.67)
	Kendaraan	\$ 121,828.94	\$ 321,809.27	\$ 199,980.33	\$ 49,995.08
	Bangunan dan Listrik	\$ 499,678.67	\$ 440,822.42	\$ (58,856.25)	\$ (14,714.06)
	Masjid	\$ 1,756.63	\$ 1,668.80	\$ (87.83)	\$ (21.96)
	Total	\$ 6,723,898.64	\$ (2,615,218.30)	\$ (9,339,116.94)	\$ (2,334,779.24)

Berdasarkan tabel 30 diatas dapat diketahui bahwa
besarnya penghematan beban pajak pada tahun 2010-2013

yang diperoleh jika perusahaan memilih saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan, (tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak yang sudah ditanggungkan sebesar 25%) karena perusahaan telah mencapai laba diatas Rp 100.000.000 dengan tingkat discount factor pada tahun 2012-2013, maka potensi total penghematan pajaknya sebesar \$ 989,071.26 jika menggunakan metode saldo menurun untuk menyusutkan metode aset tetapnya.

Berikut adalah tabel perbandingan antara beban pajak dengan penghematan pajaknya sehingga akan diketahui besarnya penghematan yang akan diperoleh pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun.

Tabel 31
PT Citra Abadi Sejati
Perbandingan Beban Pajak dengan Potensi
Penghematan Pajak Tahun 2010-2013

Tahun	Beban PPh	Potensi Penghematan Beban Pajak	Persentase %
2010	\$ 7,083,204.99	\$ 2,403,548.44	34%
2011	\$ 254,060.02	\$ 24,434.35	10%
2012	\$ (2,077,600.19)	\$ (1,082,274.81)	52%
2013	\$ (7,613,044.18)	\$ (2,334,779.24)	31%

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penyusutan aset tetap pada PT. Citra abadi Sejati telah sesuai dengan peraturan perpajakan, karena telah sesuai dengan pasal yang berlaku saat ini yaitu pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 mengenai metode penyusutan yang diperkenankan oleh perpajakan (garis lurus atau saldo menurun) dan perusahaan dalam laporan fiskalnya telah menerapkan metode penyusutan garis lurus untuk penyusutan asetnya.
2. Penerapan metode penyusutan aset tetap lainnya yang sesuai dengan peraturan perpajakan sangat mungkin untuk diterapkan pada PT. Citra Abadi Sejati karena jika menggunakan metode penyusutan yang berbeda dari metode penyusutan yang digunakan saat ini oleh perusahaan, berdasarkan hasil perhitungan beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus tahun 2010 \$ 5,504,724.40 sedangkan dengan metode saldo menurun sebesar \$ 15,118,918.14 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 9.614.193.7. tahun 2011 \$ 5.565.735.66 sedangkan metode saldo menurun sebesar \$ 5,663,473.07 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 97,737.41, tahun 2012 sebesar \$ \$ 6,496,135.42 sedangkan dengan

metode saldo sebesar \$ 2,167,125.49 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 4,329,009.93, dan tahun 2013 sebesar sebesar \$ 6,723.898.64 dengan metode saldo menurun sebesar \$ 2,616,887.10 sehingga terdapat selisih sebesar \$ 4,107,011.54.

3. Perencanaan pajak aset tetap berpengaruh terhadap besarnya PPh badan, maka oleh sebab itu sebaiknya PT. Citra abadi Sejati menerapkan perencanaan pajak aset tetap agar beban pajak perusahaan lebih efisien, berdasarkan hasil perhitungan di bab sebelumnya berikut ini penghematan beban pajak yang dapat dirasakan oleh perusahaan jika menerapkan perencanaan pajak atas aset tetapnya sebagai berikut ini yaitu pada 2010 potensi kehematan beban pajak adalah sebesar \$ 2,403,584.44 atau sebesar 34%, pada tahun 2011 potensi kehematan beban pajak sebesar \$ 24,434.35 atau sebesar 10%, pada tahun 2012 potensi kehematan beban pajak sebesar \$ (1,082,274.81) atau sebesar 52%, dan pada tahun 2013 potensi kehematan beban pajak sebesar \$ (2,334,779.24) atau sebesar 31%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas sebelumnya maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan :

1. Bagi manajemen PT. Citra Abadi Sejati :

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, seharusnya PT. Citra Abadi Sejati melakukan perencanaan pajak khusus dengan menerapkan

metode penyusutan saldo menurun terhadap aset tetapnya karena masih terdapat celah dalam meminimalisasikan beban pajak PT. Citra Abadi Sejati yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yaitu dengan cara memilih metode penyusutan yang tepat dalam perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan sehingga dapat memperkecil beban pajak penghasilan PT. Citra Abadi Sejati

2. Bagi peneliti selanjutnya :

Bagi siapa saja yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul yang sama, disarankan melakukan penelitian dan menganalisis faktor-faktor perencanaan pajak lainnya yang dapat diterapkan pada PT. Citra Abadi Sejati dan yang sekiranya dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan, seperti revaluasi aset tetap, pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk *cash* atau natura dan lain sebagainya.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan														
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Pengajuan Judul	**	**													
2	Studi Pustaka		**													
3	Pembuatan Makalah Seminar			**	**											
4	Seminar					**										
5	Pengesahan						**									
6	Pengumpulan Data							**								
7	Penulisan Laporan dan Bimbingan							**								
8	Sidang Skripsi										*					
9	Penyempurnaan Skripsi											*				
10	Pengesahan											*				

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat jenderal pajak.2008.Undang - undang No.36 Tahun 2008*
- Direktorat jenderal pajak.2008.Undang - undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang - undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta*
- Direktorat Jenderal Pajak 2007. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Diana, Anastasia dan Setiawati,Lilis. 2009.*Perpajakan Indonesia*.Andi Offset: Yogyakarta
- Muljono, Djoko.2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi Offset
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Purba. Rinaldhie. 2012 *Sistem Perpajakan di Indonesia Saat Ini*
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 (Revisi 2009) Tentang Definisi Sewa
- Suandy, Erly.2013. *Perencanaan Pajak edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ 2011. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ 2008. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ 2006. *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thomas Sumarsan. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak (ed 2)*. PT. INDEKS, Jakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Yustinus Prastowo. 2011. *Panduan Lengkap Pajak*. Raih Asa Sukses, Depok.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2010

		(USD)
<u>ASSETS</u>		
I <u>CURRENT ASSETS</u>		
1.	Cash and cash equivalents	318,672.40
2.	Securities	1,653.19
3.	Trade receivable	5,980,984.12
4.	Other receivable	211,593.18
5.	Inventory	14,016,868.16
6.	Prepaid tax	903,229.36
7.	Prepaid expense	31,583.37
8.	Advance payments	303,665.68
9.	Other current assets	37,683.03
		21,805,932.49
II <u>FIXED ASSETS</u>		
1.	Land	1,609,458.47
2.	Building & Electricity	8,202,238.81
3.	Machinery	17,444,387.29
4.	Office Equipments	3,641,724.72
5.	Vehicles	1,025,453.28
		31,923,262.57
6.	Accum.depr.Fixed assets	(20,324,043.25)
		11,599,219.32
III. <u>OTHER ASSETS</u>		
1.	Construction in progress	92,355.78
2.	Advance payment for land acquisition	190,114.51
3.	Security deposit	41,252.39
		323,722.68
TOTAL ASSETS		33,728,874.49

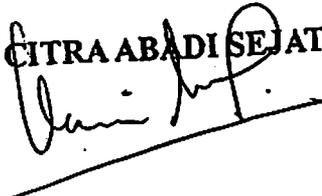
PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2010
(lanjutan)

(USD)

LIABILITIES AND EQUITIES

IV.	<u>CURRENT LIABILITIES</u>	
	1. Short term bank loan	4,061,874.59
	2. Trade payable	9,919,076.84
	3. Others payable	5,157,316.70
	4. Accrued expense	297,387.50
	5. Tax payable	191,050.71
		<u>19,626,706.34</u>
V.	<u>NON CURRENT LIABILITIES</u>	
	1. Long term loans to related parties	3,000,000.00
	2. Deferred tax liability	139,554.76
		<u>3,139,554.76</u>
VI.	<u>EQUITIES</u>	
	1. Outhorized capital	8,221,430.80
	2. Premium on share capital	186,715.02
	3. Difference in value from restructuring transaction with entity under common control	(1,137,911.81)
	4. Retained eranings	3,009,570.03
	5. Profit/(Loss) Current year	682,809.35
		<u>10,962,613.39</u>
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES	<u><u>33,728,874.49</u></u>

P.T. CITRA ABADI SEJATI



PT. CITRA ABADI SEJATI
STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2010

		(USD)	(USD)
I	Income		
	- Export sales	59,265,785.03	59,400,598.41
	- Local sales	82,642.34	
	- Stitching income	52,171.04	
		59,300,598.41	
II	Cost of Goods Sold		(49,412,710.98)
	Gross Profit		9,987,887.43
III	Expenses :		
	Selling Expenses		
	- Marketing expense	40,648.59	
	- Freight outward	425,777.72	
	- Export expense	386,682.26	
		853,108.57	
	Administration and General Expenses :		
	- Salaries	4,787,596.70	
	- Stationery expense	182,711.25	
	- Telephone & internet expense	143,706.84	
	- Repair and maintenance	244,264.92	
	- Traveling expense	462,273.11	
	- Others expense	182,434.30	
	- Depreciation of fixed asset	335,309.88	
	- Professional fee	36,155.67	
	- Rent expense	271,390.70	
	- Licenses	56,282.42	
	- Pajak Bumi & Bangunan	7,677.10	
	- Recruitment & training expense	1,487.15	
	- Polyclinics	29,767.03	
	- Jamsostek expense	122,620.86	
	- Food expense	120,627.67	
	- Bank charges	129,901.58	
	- Cash insurance	15,319.95	
		7,129,527.13	
IV	Laba / (Rugi) Usaha		7,982,635.70
			2,005,251.73
V	Others Income/Expenses		
	- Interest income	425.27	
	- Other income	55,177.36	
	- Income/Expense overseas	25,307.60	
	- Loss on sale of property equipment	3,453.41	
	- Tax expenses	(1,795.36)	
	- Exchange Curr.Fluctuation (ECF)	(57,038.37)	
	- Interest expense	(1,010,945.05)	
		(985,415.14)	
VI	Profit/(Loss) before Tax		1,019,836.59
VII	Corporate Tax		
	- Current Tax	(303,297.40)	
	- Deferred Tax	(33,729.84)	
		(337,027.24)	
	Profit/(Loss) after Tax		682,809.35

P.T. CITRA ABADI SEJATI


PT. CITRA ABADI SEJATI
COST OF GOODS SOLD CALCULATION
for the ended DECEMBER 31, 2010

	(USD)	(USD)
I MATERIAL CONSUMPTION		
A <u>Opening balance</u>		
- Raw Material	4,209,388.96	
- Indirect Material	1,316,649.40	
	5,526,038.36	
B <u>Purchases Tahun 2009</u>		
- Raw Material	26,623,840.50	
- Indirect Material	10,280,817.03	
	36,904,657.53	
Materials available for production	42,430,695.89	
C <u>Closing balance</u>		
- Raw Material	(5,312,796.33)	
- Indirect Material	(2,834,025.67)	
	(8,146,822.00)	
Total material consumption		34,283,873.89
II LABOR WAGES		8,150,886.10
III FACTORY OVERHEAD		
- Freight inward cost	1,486,384.04	
- Building and machinery maintenance	385,974.99	
- Insurance expenses	52,091.66	
- Electricity cost	408,464.09	
- Processing garment expense	1,969,707.07	
- Fuel & lubricant	31,597.72	
- Depreciation of Machine & Building	1,118,088.20	
- Import charges	57,889.29	
- Rent of machinery	44,946.48	
- Material cost others	440,683.27	
- Production equipment	133,811.96	
- Food & drink expense	212,029.41	
- Jamsostek	133,505.41	
- Spare and consumable cost	100,757.03	
	6,575,930.62	
IV CLOSING BALANCE WORK IN PROCESS		
- Opening balance	5,264,465.58	
- Closing balance	(5,068,635.14)	
	195,830.44	
COST OF GOODS MANUFACTURING		49,206,521.05
V FINISHED GOODS		
- Opening balance	952,296.13	
- Closing balance	(746,106.20)	
	206,189.93	
COST OF GOODS SOLD		49,412,710.98

PT. CITRA ABADI SEJATI
RECONCILIATION PROFIT LOSS FISCAL FOR THE YEAR 2016
(Lampiran Formulir 1771-Q15-b)

	(USD)	(USD)
I. PROFIT BEFORE INCOME TAX (COMMERCIAL)		1,019,836.59
II. Temporary Difference :		
- Depreciation of commercial	1,453,398.17	
- Depreciation of fiscal	1,491,899.09	(38,500.92)
III. Permanent Difference		
- Polyclinic expense	29,327.42	
- Depreciation of property , plant and equipment	23,024.65	
- Telephone expense	14,329.08	
- Donation & entertainment	12,053.28	
- Tax expenses	1,795.36	
- Leasing interest - sedan	30.82	
- Other expense	2,031.67	
- Loss on sale of property equipment	21,212.13	
- Interest income subject to final tax	(425.27)	
- Installment of lease obligation	(1,509.82)	
		101,869.32
IV. PROFIT BEFORE INCOME TAX (FISCAL)		1,083,204.99
VI. TAXES		
- 28% x USD 1,083,204,99		303,297.40
VII. ADVANCE TAXES		
- PPh Pasal 22 (Impor)	1,013.63	
- PPh Pasal 23	1,043.43	
- Angsuran PPh Pasal 25	259,883.30	
- Fiscal foreign	223.01	262,163.37
UNDER (OVER) PAYMENT FOR CORPORATE INCOME TAX		41,134.03

P.T. CITRA ABADI SEJATI

[Handwritten Signature]

PT. CITRA ABADI SEJATI
 BALANCE SHEETS
 AS ON DECEMBER 31, 2011

		(USD)
<u>ASSETS</u>		
I	<u>CURRENT ASSETS</u>	
	1. Cash and cash equivalents	316,200.40
	2. Securities	1,653.19
	3. Trade receivable	7,444,687.63
	4. Other receivable	149,298.39
	5. Inventories	15,076,113.61
	6. Prepaid tax	576,430.19
	7. Prepaid expense	65,285.15
	8. Purchase advance	510,534.58
	Other current assets	19,971.39
		24,160,174.53
II	<u>FIXED ASSETS</u>	
	1. Land	1,609,458.47
	2. Building & Electricity	8,204,351.67
	3. Mosque	37,767.53
	4. Machinery	17,444,387.30
	5. Office Equipments	3,709,504.28
	6. Vehicles	1,116,372.59
		32,121,841.84
	7. Accum.depr.Fixed assets	(21,782,298.60)
		10,339,543.24
III	<u>Construction in Progress</u>	
	1. Building & Electricity	854,567.36
		854,567.36
IV.	<u>OTHER ASSETS</u>	
	1. Advance payment for land acquisition	950,468.67
	2. Security deposit	144,667.59
		1,095,136.26
	TOTAL ASSETS	36,449,421.39

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2011
(lanjutan)

		(USD)
<u>LIABILITIES AND EQUITIES</u>		
V.	<u>CURRENT LIABILITIES</u>	
	1. Short term bank loan	8,648,877.99
	2. Trade payable	9,574,463.50
	3. Others payable	2,721,787.04
	4. Tax payable	131,468.16
	5. Accrued expense	171,463.83
	6. Current portion of loan : - Long term bank loans	292,000.00
		21,540,060.52
VI.	<u>NON CURRENT LIABILITIES</u>	
	1. Long term bank loans	308,000.00
	2. Loan to USG	3,000,000.00
	3. Deferred tax liability	120,882.75
		3,428,882.75
VII.	<u>EQUITIES</u>	
	1. Outhorized capital	8,221,430.80
	2. Share in Portepcle	186,715.02
	3. subscribed capt and paid capt	8,408,145.82
	Difference in value from restructuring transaction with entity under common control	(1,137,911.81)
	5. Retained earning	3,692,379.38
	6. Profit/(Loss) Current year	517,864.73
		11,480,478.12
TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES		36,449,421.39

PT. CITRA ABADI SEJATI
STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011

	(USD)	(USD)
I	Income	
	- Export sales	71,718,900.62
	- Local sales	71,622,033.84
	- Stitching income	96,866.78
		-
II	Cost of Goods Sold	
	Gross Profit	(61,396,804.98)
		10,322,095.64
III	Beban Usaha :	
	Selling Expenses	
	- Marketing expense	57,064.27
	- Freight outward	679,161.80
	- Export expense	270,839.25
		1,007,065.32
	Administration and General Expenses :	
	- Salaries	6,153,162.98
	- Profesional fee	43,889.98
	- Stationery expense	154,581.41
	- Recruitment & training expense	11,250.13
	- Traveling expense	680,384.12
	- Repair and maintenance	110,493.27
	- Rent expense	212,089.96
	- Telephone & internet expense	112,519.15
	- Others expense	252,009.37
	- Pajak Bumi & Bangunan	-
	- Cash insurance	-
	- Jamsostek expense	125,564.96
	- Licenses & Permi:	-
	- Depreciation of fixed asset	300,134.08
	- Food expense	-
	- Bank charges	56,355.09
	- Polyclinics	19,552.50
		8,231,987.00
		9,239,052.32
IV	Labn / (Rugi) Usaha	1,083,043.32
V	Others Income/Expenses	
	- Interest income	1,510.27
	- Other income	257,899.20
	- Tax expense	(24,340.10)
	- Bad debt	(44,166.79)
	- Exchange Curr.Fluctuation (ECF)	33,672.60
	- Interest expense	(535,693.75)
		(311,118.57)
VI	Profit/(Loss) before Tax	771,924.75
VII	Corporate Tax	
	- Current Tax	(272,732.03)
	- Deferred Tax	18,672.01
		(254,060.02)
	Profit/(Loss) after Tax	517,864.73

PT. CITRA ABADI SEJATI
COST OF GOODS SOLD CALCULATION
for the ended DECEMBER 31, 2011

	(USD)	(USD)
I OPENING BALANCE WORK IN PROCESS		5,068,635.14
II MATERIAL CONSUMPTION		
A <u>Opening balance</u>		
- Fabrics	5,312,796.33	
- Indirect Material	2,834,025.67	
	8,146,822.00	
B <u>Purchases Tahun 2007</u>		
- Fabrics	39,498,441.83	
- Indirect Material	3,186,882.11	
	42,685,323.94	
Materials available for production	50,832,145.94	
C <u>Closing balance</u>		
- Fabrics	6,908,431.26	
- Indirect Material	1,818,587.02	
	8,727,018.28	
Total material consumption		42,105,127.66
III LABOR WAGES		10,083,806.48
IV FACTORY OVERHEAD		
- Insurance expense	67,192.98	
- Freight inward cost	2,117,789.49	
- Fuel & lubricant	269,404.82	
- Import charges	99,545.51	
- Electricity cost	459,260.18	
- Building and machinery maintenance	380,404.02	
- Rent of machinery	83,462.13	
- Processing garment expense	2,970,920.46	
- Material Cost Others	1,264,672.20	
- Depreciation of Machine & Building	1,158,121.31	
- Food & drink expense	430,010.76	
- Jamsostek	193,672.49	
- Spare and consumable cost	203,411.25	
	9,697,867.60	
V CLOSING BALANCE WORK IN PROCESS		(3,224,918.50)
COST OF GOODS MANUFACTURING		63,730,518.38
VI FINISHED GOODS		
- Opening balance	746,106.20	
- Closing balance	(3,079,819.60)	(2,333,713.40)
COST OF GOODS SOLD		61,396,804.98

PT CITRA ABADI SEJATI
NOTE TO FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
December 31, 2011 and 2010

9. TAXATION (Continued)

c. Corporate income tax

A reconciliation between profit before income tax, as shown in the statements of income and estimated taxable income which were calculated by the Company for the years ended December 31, 2010 and 2009 are as follows:

	2 0 1 0	2 0 0 9
	US \$	US \$
Profit before income tax	771,924.75	1,019,836.59
Fiscal adjustments consist of:		
Permanent differences:		
Non deductible expenses/(non taxable income):		
Travelling expenses	49,362.11	-
Bad debt expenses	44,166.79	-
Donation and entertainment	25,886.60	12,053.37
Taxes expense	24,340.10	1,795.36
Depreciation of property, plant and equipment	21,535.90	31,086.82
Polyclinic/medical expense	19,374.57	29,327.42
Telephone expenses	13,515.67	14,329.08
Repair and maintenance	4,880.06	-
Interest income subject to final tax	(587.20)	(425.27)
Other expenses - net	41,840.73	2,062.49
Total permanent differences	<u>244,315.33</u>	<u>90,229.27</u>
Temporary differences:		
Depreciation of property, plant and equipment	74,688.05	(30,993.90)
Depreciation of lease assets	-	5,642.85
Installment of lease obligation	-	(1,509.82)
Total temporary differences	<u>74,688.05</u>	<u>(26,860.87)</u>
Estimated taxable income	<u>1,090,928.13</u>	<u>1,083,204.99</u>
Estimated current income tax	272,732.03	303,297.40
Prepaid income tax	(265,386.49)	(262,163.37)
Under payment for corporate income tax	<u>7,345.54</u>	<u>41,134.03</u>

According to tax regulations, corporate income tax payable is computed by taxpayer. However, the tax authority may conduct tax audit on the Company within five years.

PT. CITRA ABADI SEJATI
STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012

		(USD)	(USD)
I	Income		
	- Export sales	91.450.184,70	91.597.813,55
	- Local sales	122.813,89	
	- Other Sales	24.814,96	
		91.450.184,70	
II	Cost of Goods Sold		(78.691.849,69)
	Gross Profit		12.905.963,86
III	Beban Usaha :		
	Selling Expenses		
	- Marketing expense	101.645,55	
	- Freight outward	1.432.098,41	
	- Export expense	563.179,85	
		2.096.923,81	
	Administration and General Expenses :		
	- Salaries	7.798.134,34	
	- Profesional fee	129.419,35	
	- Stationery expense	158.276,10	
	- Traveling expense	1.021.140,64	
	- Repair and maintenance	145.019,07	
	- Rent expense	269.057,86	
	- Telephone & internet expense	103.993,98	
	- Others expense	472.676,11	
	- Jamsostek expense	136.609,07	
	- Depreciation of fixed asset	319.009,59	
	- Bank charges	109.349,95	
	- Polyclinics	9.212,31	
		10.671.898,37	
			12.768.822,18
IV	Labn / (Rugi) Usahn		137.141,68
V	Others Income/Expenses		
	- Interest income	2.077,60	
	- Other income	134.994,21	
	- Gain on sale of Fixed assets	71.751,20	
	- Exchange Curr. Fluctuation (ECF)	73.724,21	
	- Interest expense	(893.411,79)	
		(893.411,79)	(610.864,57)
VI	Profit/(Loss) before Tax		(473.722,89)
VII	Corporate Tax		
	- Current Tax		
	- Deferred Tax	87.480,84	
		87.480,84	87.480,84
	Profit/(Loss) after Tax		(386.242,05)

PT. CITRA ABADI SEJATI

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2012

(USD)

ASSETS

I CURRENT ASSETS

1.	Cash and cash equivalents	867.649,70
2.	Time deposit	67.546,43
3.	Securities	1.653,19
4.	Trade receivable	8.490.987,71
5.	Other receivable	494.619,95
6.	Inventories	11.862.615,83
7.	Prepaid tax	939.590,86
8.	Prepaid expense	69.021,08
9.	Purchase advance	1.114.796,69
10.	Other current assets	82.477,11
		<u>23.990.958,55</u>

II FIXED ASSETS

1.	Land	2.442.483,27
2.	Building & Electricity	10.500.112,74
3.	Machinery	20.627.793,00
4.	Office Equipments	4.129.587,75
5.	Vehicles	940.589,45
		<u>38.640.566,21</u>
6.	Accum.depr.Fixed assets	(23.015.963,57)
		<u>15.624.602,64</u>

III OTHER ASSETS

1.	Bank Guarantee	6.882,89
2.	Advance payment for Fixed assets	5.994,03
3.	Security Deposit	66.850,35
4.	Long term Investment PT. Sakura	348.000,00
		<u>427.727,27</u>

TOTAL ASSETS

40.043.288,46

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2012
(lanjutan)

(USD)

LIABILITIES AND EQUITIES

V. CURRENT LIABILITIES

1.	Short term bank loan	8.273.278,49
2.	Trade payable	6.768.658,42
3.	Others payable	6.817.658,14
4.	Tax payable	159.765,72
5.	Accrued expense	295.421,39
6.	Current portion of loan :	
	- Short term bank loans	672.000,00
	- Consumer financing loans	81.109,58
		<u>23.067.891,74</u>

VI. NON CURRENT LIABILITIES

1.	Long term bank loans	1.736.000,00
2.	Credit Financing Loan	111.758,74
3.	Loan to USG	4.000.000,00
4.	Deferred tax liability	33.401,91
		<u>5.881.160,65</u>

VII. EQUITIES

1.	Outhorized capital	8.221.430,80
2.	Premium on Share Capital subscribed capt and paid capt	186.715,02
		<u>8.408.145,82</u>
	Difference in value from restructuring transaction with entity under common control	(1.137.911,81)
3.	Retained earning	4.210.244,11
4.	Profit/(Loss) Current year	(386.242,05)
5.		<u>11.094.236,07</u>

TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

40.043.288,46

~~PT CITRA ABADI SEJATI~~

PT. CITRA ABADI SEJATI
COST OF GOODS SOLD CALCULATION
for the ended **DECEMBER 31, 2012**

	(USD)	(USD)
I MATERIAL CONSUMPTION		
A Opening balance		
- Fabrics	6.908.431,26	
- Indirect Material	1.818.587,02	
	8.727.018,28	
B Purchases Tahun 2011		
- Fabrics	43.633.455,53	
- Indirect Material	4.935.764,69	
	48.569.220,22	
Materials available for production	57.296.238,50	
C Closing balance		
- Fabrics	5.329.738,28	
Indirect Material	1.943.063,98	
	7.272.802,26	
Total material consumption		50.023.436,24
II LABOR WAGES		14.834.960,91
III FACTORY OVERHEAD		
- Insurance expense	89.166,43	
- Freight inward cost	2.117.493,42	
- Fuel & lubricant	290.580,79	
- Import charges	108.604,33	
- Electricity cost	622.031,84	
- Building and machinery maintenance	520.123,00	
- Rent of machinery	46.038,83	
- Processing garment expense	3.950.421,56	
- Material Cost Others	1.508.787,78	
Depreciation of Machine & Building	1.313.191,26	
Food & drink expense	937.458,75	
Jamsostek	304.094,41	
Spare and consumable cost	261.349,39	
	12.069.341,79	
V WORK IN PROCESS		
- Opening balance	3.224.918,50	
- Closing balance	(2.493.268,09)	
	731.650,41	
COST OF GOODS MANUFACTURING		77.659.389,35
VI FINISHED GOODS		
- Opening balance	3.079.819,60	
- Closing balance	(2.047.359,26)	
	1.032.460,34	
COST OF GOODS SOLD		78.691.849,69

PT. CITRA ABADI SEJATI
REKONSILIASI FISKAL LABA/(RUGI) TAHUN PAJAK - 2012
(Lampiran Formulir 1771-Q15-b)

	US\$	US\$
I. PROFIT BEFORE INCOME TAX (COMMERCIAL)		(473.722,89)
II. Temporary Difference :		
- Depreciation of commercial	1.632.200,85	
- Depreciation of fiscal	1.587.614,92	
	44.585,93	44.585,93
III. - Gain on sales of Fixed assets commercial	8.403,72	
- Gain on sales of Fixed assets Fiscal	14.611,97	
	6.208,25	6.208,25
IV. Permanent Difference		
- Polyclinic expense	9.212,34	
- Depreciation of Vehicles - Sedan	28.952,80	
- Depreciation of Building - Mosque	2.744,70	
- Telephone expense	12.863,23	
- Donation	6.384,35	
- Other Expenses	12.017,12	
- Sport and Picnic	4.234,99	
- Leasing interest - sedan	11.771,42	
- Leave Travel	7.944,45	
- Entertainment	29.751,72	
	125.877,12	125.877,12
V. KOREKSI NEGATIF		
- Interest income subject to final tax	(2.077,60)	(2.077,60)
		174.593,70
VI. ESTIMATED TAXABLE INCOME FOR CURRENT YEAR		(299.129,19)
VII. ESTIMATED CURRENT INCOME TAX		
- 25% x US\$		
VIII. PREPAID TAXES		
- PPh Pasal 22 (import)	40.007,79	
- PPh Pasal 23	220,32	
- Angsuran PPh Pasal 25	278.253,42	
	318.481,53	318.481,53
OVER/(UNDER) PAYMENT FOR CORPORATE INCOME TAX		318.481,53

PT CITRA ABADI SEJATI

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2013

(USD)

ASSETS

I CURRENT ASSETS

1.	Cash and cash equivalents	942.719,25
2.	Time Deposit	255.759,83
3.	Short Term Investment	1.653,19
4.	Trade receivable	7.106.010,20
5.	Other receivable	897.272,84
6.	Inventories	13.453.977,20
7.	Prepaid tax	652.776,07 ✓
8.	Prepaid expense	64.866,63
9.	Purchase advance	323.208,21
10.	Other current assets	56.481,80
		23.754.725,22

II FIXED ASSETS

1.	Land	2.407.199,27
2.	Building & Electricity	10.743.091,38
3.	Mosque	57.767,53
4.	Machinery	21.940.523,93
5.	Office Equipments	4.292.202,80
6.	Vehicles	849.317,76
		40.270.102,67
7.	Accum.depr.Fixed assets	(24.674.487,34)
		15.595.615,33

III OTHER ASSETS

1.	Security Deposit	62.293,95
2.	Investment PT. Sakura	588.000,00
3.	Deferred Tax Assets	135.195,89 ✓
		785.489,84

TOTAL ASSETS

40.135.830,39

PT. CITRA ABADI SEJATI
BALANCE SHEETS
AS ON DECEMBER 31, 2013
(lanjutan)

(USD)

LIABILITIES AND EQUITIES

V. CURRENT LIABILITIES

1.	Short term bank loan	3.977.271,88
2.	Trade payable	9.280.698,00
3.	Others payable	8.210.137,61
4.	Tax payable	84.833,53
5.	Accrued expense	627.537,02
6.	Current portion of loan :	
	- Long term bank loans	962.687,00
	- Consumer financing loans	81.084,95
		<u>23.224.249,99</u>

VI. NON-CURRENT LIABILITIES

1.	Long term bank loans	2.238.065,49
2.	Credit Financing Loan	23.725,22
3.	Loan to USG	5.000.000,00
		<u>7.261.790,71</u>

VII. EQUITIES

1.	Outhorized capital	8.221.430,80
2.	Share in Portepole	186.715,02
3.	subcribed capt and paid capt	8.408.145,82
	Difference in value from restructuring transaction	
4.	with entity under common control	(1.137.911,81)
5.	Retained earning	3.824.002,06
6.	Profit/(Loss) Current year / laba bersih	(1.444.446,38)
	leha / van sebelum	9.649.789,69

TOTAL LIABILITIES AND EQUITIES

40.135.830,39

~~PT. CITRA ABADI SEJATI~~

PT. CITRA ABADI SEJATI
COST OF GOODS SOLD CALCULATION
for the ended **DECEMBER 31, 2013**

	(USD)	(USD)
OPENING BALANCE WORK IN PROCESS (SRDP awal)		2.493.268,09
MATERIAL CONSUMPTION		
A Opening balance		
- Fabrics	5.329.738,28	
- Indirect Material	1.959.804,57	
	7.289.542,85	
B Purchases Tahun 2012		
- Fabrics	43.627.537,64	
- Indirect Material		
	43.627.537,64	
Materials available for production	50.917.080,49	
C Closing balance		
- Fabrics	6.324.431,29	
- Indirect Material	1.448.506,46	
	7.772.937,75	
Total material consumption (bahan baku)		43.144.142,74
II LABOR WAGES (upah buruh)		11.951.722,50
V FACTORY OVERHEAD		
- Insurance expense	77.738,37	
- Freight inward cost	1.567.596,74	
- Fuel & lubricant	298.611,66	
- Import charges	123.292,21	
- Electricity cost	571.071,86	
- Building and machinery maintenance	555.401,08	
- Building and machinery rent	45.415,98	
- Processing garment expense	1.028.328,31	
- Material Cost Others	561.017,99	
- Depreciation of Machine & Building	1.439.243,78	
- Food & drink expense	904.782,41	
- Jamsostek	286.339,64	
- Spare and consumable cost	218.310,57	
		7.677.150,60
CLOSING BALANCE WORK IN PROCESS (SRDP akhir)		(3.016.497,76)
COST OF GOODS MANUFACTURING		62.249.786,17
VI FINISHED GOODS		
- Opening balance	2.047.359,26	
- Closing balance	(2.679.525,99)	(632.166,73)
COST OF GOODS SOLD (untuk penjualan)		61.617.619,44

PT. CITRA ABADI SEJATI

PT. CITRA ABADI SEJATI
REKONSILIASI FISKAL LABA/(RUGI) TAHUN PAJAK 2013
(Lampiran Formulir 1771-Q15-b)

		US\$	US\$
	PROFIT BEFORE INCOME TAX (COMMERCIAL)		(1.613.044,18) ✓
I	Temporary Difference :		
	- Depreciation of commercial	1.771.469,28	
	- Depreciation of fiscal	(1.875.162,21)	
		(103.692,93)	(103.692,93) ✓
III	Permanent Difference		
	- Polyclinic expense	9.932,14	
	- Depreciation of Vehicles - Sedan	30.413,59	
	- Depreciation of Building - Mosque	2.744,70	
	- Telephone expense	5.074,54	
	- Donation	13.406,14	
	- Other Expenses	23.807,34	
	- Sport and Picnic	4.292,88	
	- Leasing interest - sedan	3.669,69	
	- Leave Travel	19.283,66	
	- Entertainment	20.604,23	
	- Different commercial & fiscal sales of fixed assets	(57.471,44)	
		75.757,47	75.757,47 ✓
IV	KOREKSI NEGATIF		
	- Interest income subject to final tax	(3.131,49)	
	- Rent Income subject to final tax	(27.000,00)	
			(30.131,49) ✓
			(58.066,95)
V	ACCUMULATES TAX LOSSES CARRIED FORWARD		(299.129,19)
VII	ESTIMATED TAXABLE INCOME FOR CURRENT YEAR		(1.970.240,32) ✓
	ESTIMATED CURRENT INCOME TAX		
VIII	- 25% x US\$		
VIII	PREPAID TAXES		
	- PPh Pasal 22 (Impor)	1.361,70	
	- PPh Pasal 23	5.172,10	
	- Angsuran PPh Pasal 25	67.241,15	
			73.774,95
	OVER/(UNDER) PAYMENT FOR CORPORATE INCOME TAX		73.774,95
	ANGSURAN PPH PASAL 25 - TAHUN 2013		

PT. CITRA ABADI SEJATI

CITRA ABADI SEJATI

Raya Kedung Halang No 263
Bogor 16710 Indonesia
Telp : 62 21 8231010/1
Fax : 62 21 82491489

SURAT KETERANGAN

No : 09.0535/CAS/1-D/IV/2015

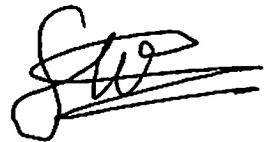
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IHDA OKTA EVI ANA
NIM : 022111116
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Yang bersangkutan telah melaksanakan RISET di PT Citra Abadi Sejati mulai tanggal 18 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pada bagian Pajak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor , 31 Desember 2014



Sujatno
Kepala Bagian Pajak